

**STUDI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KELURAHAN SRI MERANTI KOTA PEKANBARU**

TUGAS AKHIR

*Disusun Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik
Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh :

HANAFI HIDAYAT

143410637

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

**STUDI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KELUIRAHAN SRI MERANTI KOTA PEKANBARU**



NAMA : HANAFI HIDAYAT

NPM : 143410637



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KELURAHAN SRI MERANTI KOTA PEKANBARU**



FEBBY ASTERIANI, ST., MT.

Disahkan Oleh :

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

PUJI ASTUTI, ST., MT

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

STUDI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SRI MERANTI KOTA PEKANBARU

HANAFLHIDAYAT

143410637

ABSTRAK

Kelurahan Sri Meranti merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang masi memiliki status kawasan permukiman kumuh. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh. Faktor-faktor tersebut antara lain urbanisasi, sarana prasarana, ekonomi, lahan perkotaan, tata ruang, daya tarik perkotaan sosial budaya, status kepemilikan bangunan dan lama tinggal penghuni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh , dan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui tingkat kekumuhan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis skoring. Sedangkan metode yang digunakan untuk arahan penanganan kawasan permukiman kumuh adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kekumuhan dengan total keseluruhan dengan nilai 22, termasuk kategori kumuh ringan dan rata-rata kumuh sektoral 28,55%. Maka di dapatlah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kekumuhan yaitu permasalahan persampahan dengan nilai 9, sistem proteksi kebakaran 8, jaringan drainase lingkungan 3, jaringan jalan lingkungan 1, Air minum 1, sistem pembuangan limbah 0, dan kondisi bangunan 0. Untuk arahan penanganan yang didapat dari hasil kajian perhitungan tingkat kekumuhan maka masing-masing indikator seperti jalan lingkungan dilakukan perbaikan maupun pengerasan, perbaikan drainase, penempatan tempat sampah,dan peningkatan sarana air komunal, peningkatan kualitas pembuangan sanitasi, penyediaan sarana proteksi kebakaran dan penyediaan sarana RTH.

Kata kunci : permukiman kumuh, tingkat kekumuhan, arahan penanganan, Kelurahan Sri Meranti

STUDY OF MANAGEMENT OF SLUM AREAS IN THE SRI MERANTI VILLAGE, PEKANBARU CITY

HANAFLHIDAYAT

143410637

ABSTRAK

Slum settlements are areas that have been neglected from urban development with the environmental conditions of the settlements experiencing a decline in physical, socio-economic and socio-cultural quality, dense population, and with minimal infrastructure. Sri Meranti is one of the sub-districts in Rumbai, Pekanbaru which still has the status of a slum area. Many factors can influence the existence of a slum area. These factors include urbanization, infrastructure, economy, urban land, spatial planning, urban socio-cultural attractiveness, ownership status of buildings and length of stay of residents. The purpose of this study was to determine the level of slum area in the slum area, and the direction of handling the slum area. The method used to determine the level of slum is descriptive quantitative method with scoring analysis. Meanwhile, the method used to guide the handling of slum areas is descriptive qualitative method. Based on the research results, it is known that the slum level with a total score of 22 is included in the mild slum category and the average sectoral slum is 28.55%. So the dominant factors that affect the level of slum are solid waste problems with a value of 9, fire protection system 8, environmental drainage network 3, environmental road network 1, drinking water 1, waste disposal system 0, and building condition 0. For handling directions obtained from the results of the study of calculating the level of slum, each indicator, such as road repair and hardening, repair drainage, placement of garbage bins, and improve communal water facilities, improve the quality of sanitation disposal, provide fire protection facilities and provide green open space facilities.

Keywords: Slum settlements, level of slum, handling directions, Kelurahan Sri Meranti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa pula penulis mengirimkan salam selawat kepada Nabi Besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat Islam ke jalan diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulisan Tugas Akhir ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana teknik pada Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Adapun judul dari tugas akhir ini adalah "**Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru**". Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ribuan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang berperan penting dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H M.C.I** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Eng, Muslim, ST., MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Puji Astuti, ST, MT** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Febby Asteriani, ST, MT** selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi banyak ide yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kepada Staf Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

6. Ibunda **Laili** dan Ayah **Maisal** yang sangat penulis cintai dan hormati yang selalu memberikan berbagai macam dukungan doa, moril, materil, nasihat dan motivasi hingga sampai detik ini penulis bisa kuat dalam menyelesaikan studi ini.
7. Kepada sahabat terbaik saya **Arick Bagus Prasetya, ST & Keluarga** yang tidak pernah lelah dan bosan menyupport membantu dalam segala hal perjalanan selama saya kuliah.
8. Teman-teman "**Geng Almadinah**" **Arick Bagus Prasetya, ST** , **Herri Putra, Faisal Al Fahreza, ST** , **Al Arief Rafie** yang selalu memberikan masukan, semangat dan dukungan moril setiap waktu serta banyak membantu penulis dalam berbagai hal.

Diharapkan Tugas Akhir dapat menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih maju dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepan serta bermanfaat terhadap banyak orang

Pekanbaru , 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup	8
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Materi.....	9
1.5.3 Kerangka Berfikir.....	9
1.6 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Permukiman.....	13
2.1.1 Pengertian Permukiman.....	13
2.1.2 Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman.....	13
2.1.3 Aspek Dalam Permukiman.....	14
2.2 Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	15
2.2.1 Kumuh.....	15
2.2.2 Permukiman Kumuh.....	16
2.3 Permukiman Kumuh.....	19
2.3.1 Pengertian Permukiman Kumuh.....	19
2.3.2 Indikator Permukiman Kumuh.....	20
2.3.3 Tingkat Kekumuhan.....	28
2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh.....	41
2.5 Klasifikasi Permukiman Kumuh.....	59
2.5.1 Pemetaan Kondisi dan Permasalahan Lingkungan Permukiman.....	59
2.5.2 Aspek Legalitas dan Kerentanannya.....	59
2.5.3 Asal-usul dan Umurnya.....	60
2.5.4 Lokasi dan Letaknya.....	60
2.6 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.....	61
2.7 Penelitian Terdahulu.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	74

3.1 Metode Pendekatan.....	74
3.2 Jenis Penelitian	75
3.3 Lokasi Penelitian	75
3.4 Waktu Penelitian.....	75
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	75
3.5.1 Pengumpulan Data Primer	76
3.5.2 Pengumpulan Data Sekunder.....	77
3.6 Teknik Sampling.....	77
3.6.1 Penetapan Sampel	79
3.7 Metode Analisis	80
3.7.1 Menganalisis Tingkatan Kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti	80
3.7.2 Merumuskan Arahana Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti	84
3.8 Variabel Penelitian.....	84
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	86
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	86
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru.....	86
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Pekanbaru	89
4.1.3 Pendidikan	91
4.1.4 Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru	92
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rumbai	94
4.2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Rumbai	94
4.2.2 Kependudukan	95
4.2.3 Pendidikan	96
4.2.4 Peribadatan	97
4.3 Gambaran Umum Kelurahan Sri Meranti.....	99
4.3.1 Sejarah Kelurahan Sri Meranti.....	99
4.3.2 Letak Geografi Kelurahan Sri Meranti	99
4.3.3 Kependudukan Kelurahan Sri Meranti	99
4.3.4 Sarana Kelurahan Sri Meranti	100
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Menganalisis Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti	103
5.1.1 Identifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumah di Kelurahan Sri Meranti	103
5.1.1 Identifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumah di Kelurahan Sri Meranti	103
5.1.1.1 Gambaran Kawasan Kumuh dan kondisi bangunan.....	104
5.1.1.2 Bangunan Gedung	104
5.1.1.3 Jalan Lingkungan.....	107
5.1.1.4 Penyediaan Air Minum.....	111

5.1.1.5	Drainase Lingkungan.....	113
5.1.1.6	Pengelolaan Air Limbah.....	118
5.1.1.7	Pengelolaan Persampahan.....	119
5.1.1.8	Proteksi Kebakaran.....	123
5.1.2	Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti.....	124
5.2	Merumuskan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti.....	166
5.2.1	Tahap Koordinasi dan Penyerapan Aspirasi.....	166
5.2.2	Deliniasi Kawasan Perencanaan.....	167
5.2.3	Analisis Serta Rencana Arahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Kumuh Kelurahan Sri Meranti.....	169
5.2.3.1	Analisis Serta Rencana Arahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan.....	169
5.2.3.2	Analisis Serta Rencana Arahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Drainase Lingkungan.....	174
5.2.3.3	Analisis Serta Rencana Arahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Persampahan.....	178
5.2.3.4	Analisis Serta Rencana Arahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi.....	179
5.2.3.5	Analisis Serta Rencana Arahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Proteksi Kebakaran.....	181
5.2.3.6	Analisis Serta Rencana Arahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur RTH.....	183
5.2.4	Rencana Prioritas.....	184
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		
6.1	Kesimpulan.....	185
6.2	Saran.....	188
 DAFTAR PUSTAKA		189
 LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Formulasi Penilaian Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh.....	29
Tabel 2.2 Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh.....	38
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	70
Tabel 3.1 Rumus Perhitungan Tingkat Kekumuhan	82
Tabel 3.2 Desain Penelitian.....	85
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	90
Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019	91
Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru.....	92
Tabel 4.4 Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru	93
Tabel 4.5 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Tahun 2019.....	95
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Rumbai Tahun 2019	95
Tabel 4.7 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kecamatan Rumbai Tahun 2019.....	96
Tabel 4.8 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Tahun 2019	98
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Kelurahan Sri Meranti	99
Tabel 4.10 Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Sri Meranti.....	100
Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan Kelurahan Sri Meranti.....	101
Tabel 4.12 Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Sri Meranti	101
Tabel 4.13 Jumlah Sarana Perekonomian Kelurahan Sri Meranti	102
Tabel 5.1 Kondisi Eksisting Ruas Jalan Lingkungan.....	111
Tabel 5.2 Kondisi Eksisting Drainase Lingkungan.....	118
Tabel 5.3 Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti	124
Tabel 5.4 Tingkat Kekumuhan RT004 / RW002	126
Tabel 5.5 Tingkat Kekumuhan RT005 / RW002	130

Tabel 5.6	Tingkat Kekumuhan RT004 / RW003	134
Tabel 5.7	Tingkat Kekumuhan RT005 / RW003	138
Tabel 5.8	Tingkat Kekumuhan RT007 / RW003	142
Tabel 5.9	Tingkat Kekumuhan RT003 / RW004	146
Tabel 5.10	Tingkat Kekumuhan RT001 / RW005	150
Tabel 5.11	Rekapitulasi Tingkat Kekumuhan.....	154
Tabel 5.12	Tingkat Perhitungan Akhir.....	155
Tabel 5.13	Tingkat Perhitngan Kawasan	158
Tabel 5.14	Nilai Faktor Dominan mempengaruhi tingkat kekumuhan.....	165
Tabel 5.15	Rencana Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan	171
Tabel 5.16	Rencana Peningkatan Kualitas Infrastruktur Drainase Lingkungan.....	175
Tabel 5.17	Perkiraan Volume Sampah Pada Kawasan Perencanaan.....	178
Tabel 5.18	Tabel Kebutuhan Infrastruktur Persampahan.....	179
Tabel 5.19	Rencana Prioritas	184



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	10
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Rumbai Tahun 2019	96
Gambar 4.2 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Kelurahan di Kecamatan Rumbai Tahun 2019	97
Gambar 4.3 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Rumbai Tahun 2019.....	98
Gambar 5.1 Foto Kawasan Permukiman Kumuh.....	105
Gambar 5.2 Tingkat Kepadatan Bangunan	105
Gambar 5.3 Bangunan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	107
Gambar 5.4 Kondisi Cangkupan Pelayanan Jalan Lingkungan	108
Gambar 5.5 Kondisi Kualitas Jalan Lingkungan	111
Gambar 5.6 Sumber Air Minum	112
Gambar 5.7 Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air	113
Gambar 5.8 Ketidakterediaan Drainase.....	110
Gambar 5.9 Kualitas Kontruksi Drainase	118
Gambar 5.10 Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah	120
Gambar 5.11 Kondisi Pengelolaan ampah Yang Tidak Sesuai.....	122
Gambar 5.12 Koordinasi dan Penyerapan Aspirasi	166
Gambar 5.13 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti	168
Gambar 5.14 Penempatan Arahkan Pembangunan Hidrant.....	182
Gambar 5.15 Penempatan Arahkan Pembangunan RTH.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak teratur tata letak bangunan, tingkat kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, dan sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dalam suatu kota tentu mengalami permasalahan akibat semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tentunya berdampak pada aspek kehidupan, terutama mengenai permukiman. Apabila tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membangun perumahan yang layak dan semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat tentu akan menimbulkan permukiman yang kurang layak atau kumuh. Terdapat faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh, yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor tata ruang faktor lahan perkotaan (Rindrojono, 2013).

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0% kumuh hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Definisi permukiman kumuh sendiri ialah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan

bangunan yang tinggi, kualitas bangunan tidak standar, dan keberadaan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan”. Dan kata lain, pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dalam pembahasan mengenai berbagai paradigma yang mencari jalan kearah pembangunan yang berkeadilan, serta ketidakpuasan terhadap pelaksanaan teori tersebut di negara-negara berkembang. Sehingga memunculkan teori baru yang menyajikan potensi-potensi baru yang penting untuk memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development) (Mardikanto, 2012).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, pemerintah menggunakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai program lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan. PMPN Mandiri Perkotaan, memiliki tujuan dan sasaran yaitu, terbangunya lembaga ditingkat masyarakat yang berbasis universal kemanusiaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian meningkatnya akses untuk masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan sosial, prasarana, hingga pendanaan untuk pengembangan usaha atau permodalan. Dan juga dapat

mendorong pemerintah daerah atau pemerintah daerah supaya semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) memiliki tujuan, sebagai berikut, menurunkan luas kawasan permukiman kumuh, kemudian membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) ditingkat kabupaten/kota. Dalam Program Kota tanpa kumuh diharapkan akan tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat Kota/Kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih, masyarakat sehat, dan pencegahan kumuh (Asiah, 2016).

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat. Pertumbuhan demografi dan perekonomian yang begitu pesat menjadikan Kota Pekanbaru sebagai magnet aktifitas perekonomian dan sosial.

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2019 mencapai 1.726 jiwa /km² dengan jumlah rumah tangga sebanyak 259.849 KK. Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kecamatan dengan kelurahan sebanyak 83 Kelurahan (BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2019) . Kondisi yang seperti ini memperlihatkan bahwa Kota Pekanbaru pasti tidak lepas dari adanya titik-titik lokasi pemukiman padat hunian. Berdasarkan laporan data Kota Pekanbaru, sebesaran lokasi pemukiman kumuh merata hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pemukiman kumuh tersebut

jika ditinjau berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi permukiman kumuh di sekitar sungai dan tepian jalan, drainase kota, dan tengah kampung. Sedangkan berdasarkan tingkat kekumuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu: kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan.

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 63 RW dan 252 RT. Luas wilayah Kecamatan Rumbai adalah 128,85 Km. Kecamatan Rumbai memiliki kelurahan yang teridentifikasi kawasan kumuh yaitu Kelurahan Palas, Rumbai Bukit, Muara Fajar, Umban Sari dan Sri Meranti. Namun hanya saja Kelurahan Sri Meranti yang telah masuk SK Kumuh Kota Pekanbaru 2017. Masalah yang dihadapi dalam masyarakat yaitu kondisi bangunan hunian yang buruk, jaringan jalan yang masih dibawah standar, tidak tersedianya air bersih yang masih menggunakan sumur bor bersama, tidak terawatnya drainase, tidak adanya tempat pengelolaan sampah, serta masih tidak pembuangan air limbah rumah tangga ke drainase dan tidak tersedianya hydrant di kawasan ini . Kondisi semacam ini tentunya mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan bahkan menumbuhkan permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang akan di teliti pada penelitian ini ialah pada Kelurahan Sri Meranti.

Kelurahan Sri Meranti ialah salah satu kelurahan yang menerima program KOTAKU di Kecamatan Rumbai, yang pelaksanaannya telah dimulai namun kenyataanya program yang ditujukan untuk menangani permukiman kumuh ini belum sepenuhnya dapat mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti, karena hingga saat ini Sri Meranti masih masuk dalam kategori permukiman kumuh dan masih sedikitnya program pemerintah dalam upaya proses penanganan permukiman kumuh kususnya di Kelurahan Sri Meranti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh, mengetahui faktor-faktor penyebab permukiman kumuh serta merumuskan arahan penangan kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru.*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan SK Kota Pekanbaru 2017 Kelurahan Sri Meranti pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia ialah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh.

Dilihat dari kondisi eksisting di Kelurahan Sri Meranti bahwa kondisi jaringan jalan di Kelurahan tersebut masih berada dibawah standar kelayakan jalan, seperti masih banyaknya jalan-jalan yang rusak, masih ada jalan yang belum semenisasi atau pengerasan jalan, lalu kondisi bangunan rumah yang di kelurahan Sri Meranti sebagian masih merupakan rumah dengan kondisi bangunan non permanen, dengan tingkat kerapatan cukup rapat sehingga dapat menimbulkan mudahnya kebakaran terjadi di kawasan ini. Tidak hanya itu, di kelurahan ini tidak memiliki sarana untuk pencegah kebakaran atau hydrant, dan juga tidak

adanya tempat pembuangan sampah sementara yang mana masyarakat membuang sampahnya sembarangan. Kondisi lainnya yaitu sanitasi dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang langsung menuju drainase sehingga menyebabkan masalah penumpukan dan bau yang tidak sedap, serta kondisi fisik drainase yang sudah rusak dan bahkan ada beberapa kawasan yang tidak memiliki drainase, sehingga menyebabkan genangan air sering terjadi. Pada kelurahan ini, masyarakat juga masih menggunakan sumur bor bersama untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk kegunaan sehari-hari di rumah.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti ?
2. Bagaimana rumusan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti
2. Merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti .

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat untuk:

1. Pihak Pemerintah

Bahan masukan yang bermanfaat dalam upaya studi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti di Kota Pekanbaru.

2. Pihak Akademis

Bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, dalam konteks untuk mengetahui studi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti di Kota Pekanbaru. diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan dapat menjadi referensi yang dapat diajukan sebagai bahan percontohan bagi penelitian yang sama selanjutnya.

3. Peneliti

Agar apa yang telah dilakukan selama penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang studi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti di Kota Pekanbaru. Dan memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian serta menyusun hasil penelitian.

1.5. Ruang Lingkup

Dalam studi penelitian ini ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang lingkup wilayah studi dan ruang materi, ruang lingkup materi bertujuan untuk membatasi materi pembahasan sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan begitu pesat. Pertumbuhan demografi dan perekonomian yang pesat menjadikan kota Pekanbaru sebagai magnet aktivitas perekonomian dan sosial. Kota Pekanbaru mempunyai batas daerah secara administratif dengan :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun ruang lingkup wilayah dalam pembahasan penelitian ini berada di Kelurahan Sri Meranti yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Luas wilayah Kelurahan Sri Meranti adalah 12,00 Km² memiliki 90 RT dan 20 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 19743 jiwa . (sumber : BPS Kecamatan Rumbai Dalam Angka 2019)

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada studi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti, mencakup pada hal-hal berikut :

1. Penelitian di lakukan terkait analisis tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan pada beberapa indikator.
2. Penelitian dilakukan terkait arahan penangan kawasan permukiman kumuh, menggunakan teori keberhasilan suatu kebijakan, William N. Dunn (2003)

1.5.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini ialah alternatif atau jalan keluar yang paling optimal dalam menangani permasalahan. Maka dari itu jalan keluar yang diberikan diantaranya dengan membuat secara diagramatis atau kerangka berfikir, yang mana didalamnya terdapat permasalahan yang akan dibahas yang akan di rangkum didalam rumusan masalah kemudian diidentifikasi dan menemukan sasaran yang akan dilakukan dengan menggunakan metode apa selanjutnya menentukan analisis apa yang digunakan agar dapat memecahkan persoalan yang akhirnya menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan dan di rangkum dalam kesimpulan dan saran yang mana dapat dilihat dari pada gambar

1.1 :

Latar Belakang

Masalah yang dihadapi dalam masyarakat yaitu kondisi bangunan hunian yang buruk, jaringan jalan yang dibawah standar, tidak tersedianya air bersih masih menggunakan sumur bor bersama, tidak terawatnya drainase, tidak adanya tempat pengelolaan sampah, masih dibuangnya air limbah rumah tangga ke drainase serta tidak tersedianya hydrant di kawasan ini. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan pemukiman kumuh

SASARAN

Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti

Teridentifikasi tingkat kekumuhan serta mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Bagaimana rumusan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti ?

Analisis Deskriptif Kualitatif

OUTPUT

Rumusan Arahan Penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

1.6. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan Tugas Akhir yang berjudul *Studi Penangan Kawasan Permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti* ini terdiri dari 6 bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori-teori yang berkaitan dengan permukiman kumuh, pola sebaran permukiman kumuh, faktor-faktor yang menyebabkan permukiman kumuh, serta evaluasi program kota tanpa kumuh, yang berkaitan dengan penelitian dan dapat mendukung pemecahan masalah serta menjadi dasar pengolahan data dan proses analisis yang ada dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyusun serta menganalisis data sehingga diperoleh makna yang sebenarnya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam bab ini juga membahas kerangka berfikir dan prosedur-prosedur dalam pemecahan masalah.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini memuat tentang gambaran secara umum bagaimana keadaan eksisting di wilayah penelitian, khususnya di Kelurahan Sri Meranti.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis masalah berdasarkan hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data pada bab sebelumnya yaitu tentang analisis dan pemecahan masalah terhadap hasil dari pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yang terdiri dari analisis deskriptif kualitatif kuantitatif.

BAB VI KESIMPULAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga diketahui dapat dirumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan Sri Meranti..



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman

2.1.1 Pengertian Permukiman

Menurut undang-undang No.1 Tahun 2011, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Menurut Sumaatmadja (1988) permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki keinginan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua yang diinginkan akan dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan akan perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia. Memang, tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan itu tapi paling tidak manusia selalu berusaha untuk memenuhinya.

2.1.2 Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman

Menurut Constantinos A. Doxiadis (2002) disebutkan perkembangan permukiman dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

a. *Pertambahan jumlah penduduk (growth of density)*

Adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan

demikian semakin bertambah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

b. Urbanisasi (urbanization)

Adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang berkeja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih tinggal di permukiman disekitar kawasan pusat kota (*downtown*). Ini juga akan menyebabkan pertumbuhan permukiman di kawasan pusat kota.

2.1.3 Aspek Dalam Permukiman

Suatu permukiman hendaknya mengikuti kriteria bagi permukiman yang baik, dengan memenuhi hal berikut. Silas Johan (1990) :

1. Aspek fisik, meliputi :

- a. Letak Geografis, aspek yang menentukan keberhasilan dan perkembangan dari suatu kawasan.
- b. Lingkungan alam dan binaan, aspek lingkungan alam, binaan yang akan sangat mempengaruhi kondisi permukiman serta kehidupan penghuninya.
- c. Sarana dan prasarana lingkungan, penyediaan sarana, prasarana akan mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat dalam permukiman tersebut.

2. Aspek non fisik, meliputi:

- a. Aspek politik, yang termasuk kebijaksanaan yang mengatur kawasan permukiman, keberadaan lembaga-lembaga desa dan sebagainya.
- b. Aspek ekonomi, yaitu aspek yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.
- c. Aspek sosial, yaitu aspek yang meliputi kehidupan sosial masyarakat, bertetangga dan sebagainya.
- d. Aspek budaya, yaitu aspek yang berkaitan dengan kehidupan adat istiadat, kehidupan beragama dan kebiasaan bekerja.

2.2 Kumuh dan Permukiman Kumuh

2.2.1 Kumuh

Kumuh adalah keseluruhan kesan atau penggambaran perspektif dan perilaku rendah dilihat dari cara hidup dan gaji kelas pekerja. Dengan demikian, efek samping dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan oleh masyarakat kelas atas yang kini menetap hingga kelas bawah yang belum mapan (Lazuardi 2016).

Menurut kamus ilmu-ilmu sosial *Slums* diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi daerah *slum's* dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.

Slums merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman (Hadri 2000). *Slums* yaitu permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat merosot

(kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto 1985). Dalam kamus sosiologi Slums yaitu diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan (Lazuardi 2016).

Sedangkan menurut direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum kawasan kumuh (*Slum Area*) adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya politik mengalami degradasi dan atau merakat beberapa masalah, sehingga daya dukung lahan tidak dapat di manfaatkan secara optimal. Menurut david D. Smith Istikasari dan Daryanto (2014) secara rinci memberikan batasan sebagai berikut:

1. *Slums* adalah lingkungan permukiman yang absah, legal dan permanen tetapi kondisi fisik dan lingkungannya semakin memburuk karena kurang pemeliharaan, umur bangunan yang menua, ketidakacuhan, atau karen terbagi menjadi unit perkarangan rumah atau kamar yang semakin kecil.
2. *Squatter* adalah lingkungan permukiman liar yang menempati lahan ilegal (bukan daerah permukiman) seringkali tidak terkontrol dan tidak terorganisasi, dengan kondisi fisik lingkungan dan bangunan yang semakin jelek, tanpa dilayani oleh sarana dan prasarana lingkungan kota.

2.2.2 Permukiman Kumuh

Istilah mengenai permukiman kumuh sebelumnya mulai muncul di Inggris pada tahun 1880, dimana ketika itu sedang gencar-gencarnya gerakan reformasi perumahan yang menyatakan beberapa konsep operasional terkait meterial rumah yang tidak layak bagi kehidupan manusia. Maksudnya adalah standar pelayanan

perumahan di negara tersebut dianggap sudah tidak memenuhi kelayakan terutama dalam hal teknis penyediaan material bangunan rumah. Hal ini memunculkan gagasan bahwa kawasan kumuh sudah harus dimasukkan dalam pemetaan sebuah kota yang termuat dalam agenda pembangunan kota.

Berdasarkan pendapat Acharya (2010) dan Prayitno (2016), kawasan kumuh didefinisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya kesediaan fasilitas fisik (Ruang terbuka hijau/ RTH, drainase, *Supply* air bersih, jaringan komunikasi, dan lain-lainnya), dan fasilitas sosial (organisasi, sosial, kesehatan, dan sebagainya).

Lembaga *Cities Alliance Action Plan* Mendefenisikan bahwa kawasan kumuh merupakan bagian kota yang terabaikan sehingga mengakibatkan perumahan dan konsisi kehidupan masyarakatnya berada dalam status miskin. Kawasan ini dapat terletak di tengah kota dengan kepadatan tinggi atau terbangun secara spontan di pinggiran kota.

Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) dan bentuk fisiknya tidak layak misalnya secara regular setiap tahun banjir (Yudohusodo 1991). Menurut Ramadhan dan Pigawati (2014) kawasan permukiman kumuh dapat didefenisikan sebagai :

- a. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per hektar)
- b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah.
- c. Jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar.

- d. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan.
- e. Hunian yang dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundang-undangan yang berlaku.

Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) bentuk fisik yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir. Menurut Bianpoen (1991) dan Sela (2014) lingkungan permukiman kumuh dapat digambarkan sebagai lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin dan hujan, lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur, bangunan sementara, tanpa perencanaan, prasarana kurang (MCK air bersih, saluran buangan, listrik, gang lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), mata pencaharian penghuni tidak tetap dan usaha non-formal, tanah bukan milik penghuni, pendidikan rendah, penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat, rawan kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit.

Menurut Budiharjo (1997) Kawasan pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani

prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya., permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni berdasarkan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

2.3 Permukiman Kumuh

2.3.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016).

Menurut (Undang-Undang No. 1 pasal 1 ayat 13 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman) dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Menurut (Rindarjono 2013) Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Berdasarkan pendapat Arharya (2010) dan Muta'ali (2015) kawasan kumuh di definisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya ketersediaan fisik (ruang terbuka hijau/RTH, drainase, suplai air bersih, jaringan komunikasi, dan lain-lainnya) dan fasilitas sosial (organisasi, sosial kesehatan dan sebagainya). Sedangkan menurut Suparlan (2004) dan Muta'ali (2015) mengartikan kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat dikawasan tersebut sangat buruk.

2.3.2 Indikator Permukiman Kumuh

Tingkat kekumuhan yang dapat dikenali adalah salah satu hal untuk menemukan masalah kekumuhan dalam objek studi di bagian sifat sebenarnya dari struktur dan fondasi inventif di suatu daerah. mengetahui masalah kekumuhan dilakukan tergantung pada perenungan sehubungan dengan penyelesaian dan pelaksanaan pekerjaan, prasyarat khusus sesuai pedoman yang relevan, serta prinsip-prinsip bantuan minimal yang diperlukan secara luas tergantung pada beberapa standar yang sesuai dalam Pedoman Pendeta Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Penginapan No. 2 Tahun 2016 khususnya;

1) Bangunan Gedung

Ciri ciri kekumuhan berdasarkan bangunan gedung di jabarkan sebagai berikut :

a. Bangunan yang tidak teratur

inkonsistensi bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang :

- Tidak memenuhi pengaturan desain struktur dalam Tata Ruang Titik demi Titik (RDTR) yang meliputi pengaturan bentuk, ukuran, peletakan, dan pertunjukan struktur di suatu zona; dan

- Tidak mengikuti pengaturan format struktur dan kerangka kualitas alami dalam Struktur dan Penataan Ekologis (RTBL), yang menggabungkan tindakan ekologi kotak, plot, struktur, tinggi lantai dan ketinggian, ide alam karakter, ide arah alam dan wajah jalanan.
- b. Tingkat kepadatan bangunan yang tidak dapat disangkal menurut susunan tata ruang Suatu derajat tebal bangunan yang tidak sesuai dengan susunan rencana disain adalah keadaan bangunan dalam tampilan dan dicatat dengan:
 - Koefisien Struktur Dasar (KDB) yang melampaui Perincian Tata Ruang (RDTR) atau Potensi Bangunan dan Ekologis (RTBL); atau
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melampaui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan tambahan Tata Bangunan dan Ekologis (RTBL).
- c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan suatu keadaan bangunan gedung pada perumahan atau permukiman yang berlawanan dengan persyaratan persyaratan yang ada:
 - Kontrol efek ekologis
 - Pembangunan struktur di atas dan tambahan di bawah tanah, di atas atau berpotensi terendam, di atas maupun di bawah pondasi terbuka atau kantor;
 - membangun kesejahteraan;
 - Kekuatan struktur;
 - Kenyamanan bangunan; dan
 - Kesederhanaan struktur bangunan.

Apabila Kabupaten/Kota belum memiliki RDTR dan ditambah dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Ruang (RTBL), maka penilaian kelainan dan ketebalan bangunan dilengkapi dengan mengacu pada pengesahan untuk pembangunan suatu bangunan. untuk suatu periode yang tidak kekal. Jika struktur tidak memiliki IMB dan mendukung struktur untuk waktu yang singkat, inkonsistensi dan kecepatan struktur diselesaikan oleh pemerintah provinsi dengan pemikiran Kelompok Induk Struktur (TABG).

2) Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup sebagai berikut:

- a. Jaringan jalan ekologis tidak melayani seluruh iklim pribadi atau jaringan jalan alami tidak melayani seluruh iklim alami atau merupakan kondisi ekologis atau tidak dilayani oleh jalan-jalan alami.
- b. Kualitas permukaan jalan ekologis yang buruk Kualitas permukaan jalan alami yang buruk adalah keadaan sebagian atau keseluruhan dari iklim jalan yang terjadi di luar dan di sekitar permukaan.

3) Penyediaan Air Minum

Ciri ciri kekumuhan dapat dilihat dari ketersediaan air minum yang meliputi :

- a. Ketidaktersediaan akses aman air minum

Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau,

dan tidak berasa.

- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

4) Drainase Lingkungan

Ciri ciri kekumuhan yang di lihat dari drainase lingkungan nya dapat di lihat sebagai berikut :

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan menyebabkan dorongan Limbah alam tidak dapat menguras luapan air dengan cara ini memperluas kondisi di mana jaringan rembesan tidak dapat aliran udara yang meluap menyebabkan getaran lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi beberapa kali setiap tahun.Ketidakterediaan drainase
- b. Ketidakterediaan drainase merupakan Saluran tidak dapat diakses adalah suatu kondisi di mana saluran tersier atau berpotensi lingkungan tidak dapat diakses.
- c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
Tidak terkait dengan drainase perkotaan adalah suatu kondisi di mana saluran lingkungan tidak terkait dengan langsung dalam rantai kepentingan di atas, membuat udara tidak mengalir dan menimbulkan kekhawatiran. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya



d. Tidak terpelihara sehingga pengumpulan limbah kuat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana dukungan parit tidak dapat diselesaikan seperti yang diharapkan:

- Pemeliharaan rutin; dan/atau
- Pemeliharaan berkala.

e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Kualitas pembangunan alam yang buruk adalah suatu kondisi dimana kualitas pembangunannya buruk, karena seperti penggalian tanpa bahan penutup atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

5) **Pengelolaan Air Limbah**

Ciri-ciri kekumuhan dilihat dari pengelolaan air limbah dijelaskan sebagai berikut :

a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar khusus yang sudah di tetapkan

Air limbah tidak sesuai dengan norma-norma khusus yang bersangkutan di mana air limbah para eksekutif di iklim atau perbaikan tidak memiliki kerangka kerja yang memuaskan, khususnya dari toilet/ruang penyimpanan yang terkait baik secara terpisah/homegrown, publik atau privat. tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan

air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

- Jamban leher angsa tidak terhubung dengan septic tank; dan
- Tidak ada proses/sistem pengolahan limbah terdekat.

6) Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan dilihat dari pengelolaan persampahan mencakup sebagai berikut:

- a. Sistem persampahan tidak sesuai dengan nilai-nilai teknis pada prasarana persampahan .

Hal ini merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada wilayah perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- Tempat sampah dengan penataan sampah skala rumahan atau keluarga;
- Tempat pemilhan sampah (TPS) atau TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada skala ekologis;
- Truk sampah atau kendaraan yang berpotensi membuang sampah pada skala ekologis; dan
- Tempat Pengelolaan Sampah Terkoordinasi (TPST) skala alami.

- b. Sistem pengolahan sampah tidak memenuhi kebutuhan khusus. sistem pengolahan sampah tidak memenuhi persyaratan khusus, yang merupakan prasyarat untuk membuang sampah dalam iklim pribadi atau memenuhi persyaratan berikut:

- Kapasitas dan pengaturan buatan sendiri;
- Berbagai macam ekologis
- Pemuatan lingkungan
- Pengolahan secara akumulatif lingkungan

c. Tidak didukungnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Tidak terpeliharanya sarana dan sistme kerja pengelolaan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan secara umum oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan rembesan merupakan kondisi di mana pemeliharaan kantor dewan dan pondasi tidak dilakukan sebagai: Pemeliharaan rutin; dan/atau

- Perawatan rutin; dan tambahan
- Pengecheckan berkala

7) **Proteksi Kebakaran**

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidakterediaan sebagai berikut:

a. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran

Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya :

- Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
- Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi;
- Sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemadam kebakaran; dan/atau
- Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

b. Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran

Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi :

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- Kendaraan pemadam kebakaran;
- Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
- Peralatan pendukung lainnya.

2.3.3 Tingkat Kekumuhan

Tingkat kekumuhan merupakan kegiatan yang menentukan tujuan perusahaan dan penggunaan yang tepat dari setiap lokasi. Penetapan penggunaan swadaya dilakukan dengan cara administratif, dan penghitungan swadaya dilakukan dengan cara administratif di tingkat masyarakat. Pengenal Status Kekumuhan merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kekumuhan di dalam rumah dan mencari permasalahan dengan mengungkap permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Berikut penilaian berdasarkan permasalahan permukiman kumuh, termasuk klasifikasinya (Permen PUPR 2016 No. 2). Tabel 2.1 berikut adalah rumusan penilaian lokasi kawasan permukiman kumuh.

Tabel 2.1 Formulasi Penilaian Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN						
1.	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan • 51-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan • 25-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5 3 1	Dokumen RDTR dan RTBL, Format isian dan Observasi
		Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha - Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan • 51-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan • 25-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	5 3 1	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian dan Peta Lokasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umu • Keselamatan bangunan gedung • Kesehatan bangunan gedung • Kenyamanan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis • 51-75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis • 25-50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, dan Observasi
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Cangkupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 51-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 25-50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, dan Observasi
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk • 51-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 25-50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, dan Observasi
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan akses aman air minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % populasi tidak dapat mengakses air • 51-75% populasi tidak dapat mengakses air • 25-50% populasi tidak dapat mengakses air 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60	• 76-100 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, dan

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> • 51-75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya • 25-50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3 1	Observasi
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area Terjadigenangan >30 cm, > 2 jam dan >2 x setahun • 51-75% area Terjadigenangan >30 cm, > 2 jam dan >2 x setahun • 25-50% area Terjadigenangan >30 cm, > 2 jam dan >2 x setahun 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Ketidakterseediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area tidak tersedia drainase lingkungan • 51-75% area tidak tersedia drainase lingkungan • 25-50% area tidak tersedia drainase lingkungan 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya • 51-75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya • 25-50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin; dan/atau • Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau • 51-75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau • 25-50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi krusakan	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki kualitas konstruksi kualitas drainase buruk • 51-75% area memiliki kualitas konstruksi kualitas drainase buruk • 25-50% area memiliki kualitas konstruksi kualitas drainase buruk 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 51-75% area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 25-50% area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> • Kloset leher angsa tidak terhubung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis • 51-75% area memiliki sarpras 	5 3	Wawancara, Format Isian, dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Sesuai dengan Persyaratan Teknis	dengan tangki septik; <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	air limbah tidak sesuai persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> • 25-50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1	
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • Tempat pengumpulan sampah (tps) atau tps 3r (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; • Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan • Tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki sarpras pengelolaan persampahan limbah tidak sesuai persyaratan teknis • 51-75% % area memiliki sarpras pengelolaan persampahan limbah tidak sesuai persyaratan teknis • 25-50% % area memiliki sarpras pengelolaan persampahan limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pewadahan dan pemilahan domestik; • Pengumpulan lingkungan; • Pengangkutan lingkungan; • Pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki system persampahan tidak sesuai standar • 51-75% area memiliki system persampahan tidak sesuai standar • 25-50% area memiliki system persampahan tidak sesuai standar 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Tidak Terpeliharanya	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki sarpras persampahan yang 	5	Wawancara, Format

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
				Jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: • Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016



Berdasarkan klasifikasi yang sudah dilaksanakan maka di peroleh hasil penilaian tersebut diatas, setelahnya lokasi yang menjadi wilayah penelitian permukiman kumuh dapat di klasifikasinya sebagai berikut dalam tabel 2.2 dibawah ini.



Tabel 2.2 Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

Nilai	Keterangan	Kalsifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71-95	Kumuh Berat	x	X	x	X	x	x												
45-70	Kumuh sedang							X	X	X	x	x	x						
19-44	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
Legalitas Tanah																			
(+)	Status Tanah Legal	x		x		x		X		X		x		x		x		x	
(-)	Status Tanah Tidak Legal		X		X		x		X		x		x		x		x		x
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	xx			Xx			Xx			xx			xx			xx		
6-10	Pertimbangan Lain Sedang		xx			xx			xx			xx			xx			xx	
1-5	Pertimbangan Lain Rendah			xx			Xx			Xx			xx			xx			xx
Skala Prioritas Penanganan =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - A. Kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;
 - B. Kumuh sedang bila memiliki nilai 45 - 70;
 - C. Kumuh ringan bila memiliki nilai 19 - 44;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - A. Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - B. Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - C. Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - A. Status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - B. Status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;



18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh.

Penyebab tumbuhnya lingkungan kumuh adalah Tingginya urbanisasi dan migrasi, terutama dalam kasus kelompok berpenghasilan rendah, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya membeli atau menyewakan rumah, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perbaikan lingkungan dan pemanfaatan yang rendah dinikmati oleh pemilik rumah. Kepemilikan tanah dan harga tanah (Khomarudin 1997 dan Sylvia 2017). Orang miskin tidak mampu menggunakan fasilitas perumahan dan membutuhkan akses ke lokasi bisnis menjadi penyebab timbulnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan(Suparto 2014).

Menurut Doxiadis (2002) faktor perkembangan permukiman yaitu:

a. Pertambahan jumlah penduduk (*growth of density*)

Adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

b. Urbanisasi (*urbanization*)

Adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang berkeja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman disekitar kawasan pusat kota (*downtown*). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan permukiman di kawasan pusat kota.

Menurut Muta`ali dan Nugroho (2016), faktor-faktor yang mendorong perkembangan permukiman kumuh tersebut memiliki tiga faktor yang mendorong perkembangan permukiman kumuh tersebut:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi dengan skala prioritas untuk kebutuhan hidup ekonomi individu dan kebutuhan perumahan prioritas. Orang-orang dengan pendapat yang sangat rendah tentang dalam memprioritaskan rumah, individu atau keluarga cenderung memprioritaskan lokasi rumah yang dekat dengan tempat kerja. Kelangsungan hidup sulit tanpa kesempatan kerja yang mendukung kebutuhan sehari-hari.

Keadaan rumah dan kepemilikan tanah adalah prioritas kedua, dan penampilan serta kualitas rumah adalah prioritas terakhir. Yang penting pada tahap ini adalah ketersediaan tempat berteduh dan rumah di mana Anda dapat beristirahat dalam upaya mempertahankan hidup Anda. Seiring dengan perubahan pendapatan, permintaan perumahan akan diprioritaskan. Demikian pula, keadaan kepemilikan rumah akan berubah. Status kepemilikan rumah dan tanah merupakan prioritas utama karena individu dan keluarga ingin memperoleh status kepemilikan rumah dan tanah. Karena itu, mereka yakin tidak akan diusir dan bisa tenang dan menambah penghasilan. tanpa itu. Situasi kepemilikan rumah dan tanah dan keluarga merasa tidak aman dan berkurangnya minat untuk memperluas, memelihara, dan meningkatkan kualitas rumah dengan benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat rendah dan sangat rendah, faktor lokasi terletak di antara lokasi rumah dan tempat kerja utama mereka. Sementara faktor kepemilikan rumah menjadi prioritas kedua, tampilan dan kualitas bangunan tetap menjadi prioritas utama.

2. Faktor Geografi

Dalam hal ini, unsur geografis meliputi lokasi dan ketersediaan lahan. Tanah untuk buruh, terutama tanah untuk buruh, semakin sulit dan mahal, tetapi tentu saja di luar jangkauan sebagian besar anggota masyarakat. Kesulitan dalam mengakses masyarakat dan rendahnya keamanan lahan antara lain dari spekulasi lahan, kepemilikan lahan yang berlebihan dari pihak tertentu, dan kepemilikan pemerintah yang tidak diketahui terkait dengan aspek legalitas kepemilikan (Abrams 2010).

Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya kantong-kantong permukiman kumuh di kota-kota besar khususnya Indonesia, tidak terlepas dari fenomena mobilitas penduduk yang ditengarai adanya gerakan sentripetal dan sentrifugal. Kekuatan sentripetal dan sentrifugal mengacu pada teori kekuatan dinamis (*Dynamic forces theory*) yang dikemukakan Colby (1933). Dalam teorinya Colby mengemukakan sebuah teori kekuatan dinamis yang memengaruhi perubahan pemanfaatan lahan khususnya sebagai lahan permukiman yang ada pada sebuah kota dan pinggiran sekitarnya. Kedua kekuatan tersebut terjadi karena adanya kekuatan-kekuatan sentripetal dan sentrifugal. Kekuatan-kekuatan sentripetal dan sentrifugal merupakan kekuatan penarik dan pendorong. Kedua kekuatan tersebut mempunyai sifat yang berlawanan dan keduanya berperan secara simultan dalam menciptakan gerakan sentripetal maupun sentrifugal. Gerakan sentripetal dan sentrifugal dalam teori kekuatan dinamis oleh Colby ditekankan pada daerah kota yang bersifat monosentrik sehingga daerah pinggiran kota tidak dianggap sebagai *Focul of Analysis*.

3. Faktor psikologis

Manusia didasarkan pada makhluk sosial, sehingga orang selalu bersama orang lain, dan sekelompok rumah muncul, yang kemudian disebut "rumah". Hati Anda bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga tempat berlangsungnya proses sosialisasi. Proses ini merupakan pembelajaran individu terhadap nilai-nilai dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Anda akan dapat memenuhi semua kebutuhan hidup Anda.

Kebutuhan hidup manusia tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan realisasi diri, dan kebutuhan perasaan terhadap orang lain. Kebutuhan psikologis yang paling mendasar adalah kebutuhan akan perlindungan atau rasa aman, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka rasa tidak aman ini benar-benar ditimbulkan di kalangan pemukim, meskipun kondisi perumahan tidak permanen dan lingkungan jauh dari syarat kesehatan masih dalam tahap uji coba, karena rasa aman dan saling melindungi masih dalam penyelidikan.

Rumah yang kecil-kecil dan sempit mengakibatkan seluruh anggota keluarganya berkumpul di dalam rumah hanya pada waktu tidur saja.

Seluruh kegiatan baik orang tua maupun anak sebagian besar dilakukan di luar rumah. Kepala keluarga bekerja di luar rumah, sedangkan para ibu mulai mencuci dan memasak yang juga dilakukan diluar rumah, sedangkan anak-anak bermain bersama teman-temannya diluar rumah.

Sifat *outdoor personality* yaitu orang yang lebih menyukai semua aktifitas dilakukan diluar rumah merupakan salah satu kebiasaan yang melekat pada pemukim di permukiman kumuh.

Hariyanto (2009) menyimpulkan bahwa faktor penyebab munculnya permukiman kumuh (slums dan slums) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

1. Faktor Yang Bersifat Langsung

Faktor langsung penyebab munculnya permukiman kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan permukiman penyebab kekumuhan antara lain kondisi perumahan, kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), dll, sedangkan faktor penyehatan lingkungan yang menyebabkan permasalahan antara lain kondisi air bersih, toilet, pengelolaan sampah, pengolahan air limbah domestik, drainase, dan jalan. Untuk informasi lebih rinci tentang parameter ini, lihat deskripsi berikut:

ini:

A) Komponen Fisik

- 1) Penggunaan Lahan (*Land Use*), parameter yang diteliti : tata guna lahan untuk berbagai peruntukan, mencakup penggunaan untuk fungsi lindung seperti sempadan pantai, sempadan sungai, dan daerah konservasi; penggunaan untuk fungsi budidaya seperti permukiman dan aktivitas lainnya.
- 2) Keadaan Permukiman, parameter yang diteliti: jumlah rumah, jenis rumah, kondisi rumah, jumlah penghuni, kepadatan bangunan, KDB, dan status kepemilikan lahan.
- 3) Pemeriksaan kondisi lingkungan fisik, kualitas udara dan parameter pencahayaan matahari. Kualitas udara yang buruk (penurunan kualitas udara) dan sinar matahari yang tidak mencukupi seringkali disebabkan oleh kurangnya ruang terbuka. Keadaan seperti ini akan menyebabkan udara di dalam rumah tidak mengalir dengan normal, yang akan mempengaruhi kesehatan penghuni rumah

B) Komponen Sanitasi Lingkungan

- 1) Kecukupan sumber air bersih, berdasarkan evaluasi proporsi rumah tangga yang menggunakan sungai sebagai sumber air bersih.
- 2) Nilai dasar penggunaan MCK oleh penduduk adalah proporsi penduduk yang menggunakan jamban sebagai tempat buang air besar dalam suatu satuan wilayah (unit wilayah desa).
- 3) Untuk pengolahan air limbah, penilaian dalam standar ini didasarkan pada kebiasaan pengolahan air limbah. Satuan luasan tertentu diukur dengan persentase sampah yang dibuang ke teras rumah berupa limbah domestik.
- 4) Kondisi saluran udara, kondisi saluran air (drainase) diukur dengan proporsi saluran dalam kondisi aliran pada suatu satuan luas tertentu.
- 5) Pekerjaan penumpukan dan pengelolaan sampah. Status sampah dihitung berdasarkan jumlah lokasi penumpukan sampah di suatu wilayah tertentu.
- 6) Frekuensi banjir, frekuensi banjir di ukur dari jumlah terjadinya banjir dalam satu tahun pada satuan wilayah tertentu (satuan wilayah desa).
- 7) Kondisi jalan lingkungan. Kondisi lingkungan jalan mengukur proporsi jalan dengan kondisi lingkungan sedang dan buruk pada suatu unit wilayah tertentu (desa/desa/satuan wilayah Kurakhan).

8) Kondisi informasi dan komunikasi, kondisi penerangan dan komunikasi, diukur dengan proporsi rumah tangga yang menerima layanan informasi dan komunikasi. Faktor Yang bersifat Tidak Langsung

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat. Lebih jelasnya parameter tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini:



a) Komponen Sosial Kependudukan

- 1) Jumlah penduduk, dihitung melalui dari banyaknya jumlah penduduk yang tinggal dalam satu wilayah atau kawasan.
- 2) Komposisi penduduk, dengan mempertimbangkan komposisi penduduk menurut struktur umur (belum berproduksi, berproduksi, dan tidak produktif) dan status pekerjaan (bekerja, semi berpindah atau berpindah)
- 3) Kepadatan penduduk, kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk tergantung pada ketersediaan lahan (kapasitas).
- 4) Pendidikan kependudukan, tujuannya untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk di daerah tersebut. Ini akan memahami seberapa banyak orang tahu dan mengerti tentang lingkungan yang bermanfaat, sehat dan layak huni.
- 5) Kesehatan penduduk, tujuannya untuk melihat seberapa jauh intensitas penduduk dari tingkat kesehatan yang dapat diukur dengan jenis penyakit, jumlah orang yang terkena penyakit, dll.

b) Komponen Sosial Budaya

- 1) Kebiasaan penduduk diukur menurut jumlah penduduk yang dapat mendorong munculnya kebiasaan ganda, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, kebiasaan buang air besar di sungai, teras atau tempat terbuka lainnya, ada minum Air bersih kebiasaan. Kebersihan, dll. Adat istiadat, yaitu kultur budaya masyarakat yang dapat mendorong terciptanya kawasan kumuh seperti : makan tidak makan yang penting ngumpul, dll.
- 2) Adat, yaitu budaya masyarakat, dapat mendukung terciptanya ruang-ruang tetangga, seperti: makan, tidak makan, rapat, dsb.

c) Komponen Ekonomi

- 1) Tingkat pendapatan, diukur dengan pendapatan bulanan setiap keluarga.
- 2) Kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakat diukur dengan banyaknya orang yang bekerja pada suatu bidang tertentu (PNS, buruh tani, industri, dan lain-lain).
- 3) Sarana atau fasilitas yang menunjang kegiatan ekonomi, guna melihat seberapa besar fasilitas ekonomi yang dapat melayani masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Rindrojono (2013) dan Krisandriyana (2019), faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh di daerah perkotaan, yaitu :

1. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio-ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Proses Urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang di alami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan proses urbanisasi ini berlansung pesat di karenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota-kota besar

Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa, memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah pinggiran ini.

2. Faktor Lahan Perkotaan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan.

Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit-unit hunian di permukiman yang tidak layak.

3. Faktor Prasarana dan Sarana

Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan.

5. Faktor Tata Ruang

Dalam tata ruang, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan, bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi.

Menurut Asrun (2009) dan Syam (2017) beberapa jenis permukiman kumuh yang menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk.

Hakikat urbanisasi adalah suatu proses dimana tingkat urbanisasi suatu wilayah (region) atau negara mengarah pada modernisasi perkotaan dan pedesaan. Yang terjadi adalah perpindahan individu atau kelompok orang (dan kegiatan ekonominya) dari kota ke kota atau daerah terpencil lainnya. Hal ini harus dibedakan dengan konsep laju pertumbuhan perkotaan, yang diartikan sebagai pertumbuhan penduduk perkotaan, baik mandiri maupun nasional. Tingkat urbanisasi umumnya diukur dengan rasio penduduk perkotaan terhadap penduduk nasional dalam konteks kependudukan. Namun persoalan urbanisasi tidak serta merta harus dijelaskan dari sudut pandang penduduk, bahkan harus mencakup perkembangan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi, bahkan aspek budaya dan politik..

2. Faktor Lahan di Perkotaan.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota telah menimbulkan beberapa masalah serius, termasuk masalah perumahan. Permasalahan tersebut seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara perumahan yang disediakan untuk masyarakat miskin dan masyarakat miskin di perkotaan. Selain itu, beberapa orang tidak dapat mengontrol sumber daya vital untuk mempertahankan hidup, sehingga orang-orang miskin ini hanya dapat tinggal di perumahan yang tidak layak dan berkualitas rendah. Kebijakan investasi menggunakan mekanisme pasar saat ini dan tidak terlalu mempertimbangkan pentingnya kelangsungan hidup yang memadai bagi kaum miskin kota. Masalah-masalah yang disebutkan di atas telah meningkat.

Investasi yang salah dalam penggunaan lahan sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat yang sehat dan pada akhirnya kualitas lingkungan yang mendukung kelompok yang kurang beruntung terus menurun dan rentan terhadap masalah sosial lainnya.

3. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar.

Secara umum, listrik juga dapat terlihat ketika kondisi dan infrastruktur dasar tidak mencukupi, seperti pasokan air minum, jalan, drainase, sanitasi, sekolah, pusat layanan, ruang terbuka, pasar, dll. Bahkan, sebagian besar keluarga di lingkungan penelitian memiliki sangat terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana dasar tersebut. Kemampuan memberikan pelayanan sarana dan prasarana tersebut biasanya disebabkan oleh sangat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memperoleh dan mengelola sarana dan prasarana lingkungan yang bermanfaat, serta keterbatasan kemampuan dan kemampuan, serta kesadaran masyarakat yang terbatas. Bahkan, hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya peran berbagai lembaga dan individu atau partai politik di luar pemerintah, baik profesional maupun sukarela, dalam meningkatkan infrastruktur dan infrastruktur.

4. Faktor Sosial Ekonomi.

Secara umum, sebagian besar warga masyarakat memiliki kesempatan terbatas untuk memperoleh tingkat pendapatan yang rendah karena saat ini memiliki pekerjaan. Rendahnya tingkat pendapatan mengakibatkan rendahnya daya beli atau terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan dasar. Di sisi lain, sebenarnya, ini adalah lingkungan yang dinamis dengan sebagian besar potensi kerja dan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kegiatan ekonomi kota.

Fakta menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di sektor informal telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelangsungan produksi dan kehidupan di sektor informal. Oleh karena itu, rendahnya pendapatan penduduk komunitas serius ini merupakan masalah konstan di kota.

Masalah sosial ekonomi adalah salah satu alasan mengapa urbanisasi mengalir dari kota ke kota dan dari pinggiran kota ke pusat kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan lingkungan pemrosesan baru. Kapasitas ekonomi yang tidak memadai di masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi faktor di daerah perkotaan. Karena keterbatasan pendapatan dari pekerjaan di perkotaan, semakin sulit bagi masyarakat yang hidup di garis kemiskinan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak..

5. Faktor Sosial Budaya.

Permukiman kumuh juga sering ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Secara umum rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan ini erat kaitannya dengan rendahnya harapan masyarakat , yang membatasi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, struktur sosial penghuni lingkungan sangat beragam, dan norma sosial setiap orang berbeda. Keberagaman ini terkadang menimbulkan masalah yaitu saling tidak percaya antar tetangga yang berujung pada rendahnya tingkat kekompakan. Mereka semua mengikuti struktur hubungan interpersonal dan multikulturalisme, yang mempengaruhi cara individu, keluarga, dan tetangga berinteraksi di lingkungan mereka. Karena itu, terkadang sulit untuk membentuk lembaga masyarakat atau bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konflik sosial di antara penduduk perkotaan dapat berkisar dari konflik untuk mencari pekerjaan

hingga meningkatnya tingkat kejahatan di kota, membuat kota lebih tidak aman bagi penduduk perkotaan.

6. Faktor Tata Ruang.

Dalam konstelasi penataan ruang kota, kontribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konfigurasi tata ruang kota. Oleh karena itu, penataan ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan daya dukungnya termasuk daya dukung lingkungan yang relatif rendah. Investasi yang salah dalam penggunaan ruang kota akan berdampak pada lingkungan, akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan lingkungan, membantu menciptakan lingkungan baru dan bahkan dapat berdampak pada lingkungan lama atau desa yang berharga.

7. Faktor Aksesibilitas.

Secara umum, salah satu situasi ini muncul ketika orang miskin memiliki akses terbatas ke modal masyarakat. Modal komunitas tersebut meliputi bangunan, modal pribadi dan sosial, serta lingkungan alam. Modal konstruksi meliputi informasi, jalan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, ruang terbuka, layanan, pasar, bangunan umum, sekolah, dll. Modal pribadi meliputi pendidikan, kesehatan, kemampuan, dan keterampilan. Modal sosial mencakup konektivitas dalam masyarakat, yaitu cara manusia berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, sekelompok orang membentuk organisasi, baik secara sukarela maupun melalui perusahaan atau pemerintah, yang mencakup berbagai sistem sosial yang ada, termasuk kebijakan pembangunan perkotaan. Modal lingkungan alam meliputi sumber daya alam, jasa ekosistem dan estetika alam.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diekstraksi dari alam sebagai bagian dari bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Jasa ekosistem meliputi kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman yang dapat menyediakan makanan, bahan sandang, dll..

8. Faktor Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam hal pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Meskipun begitu, pendidikan sangat ditentukan oleh pendidikan itu sendiri dan pekerjaan orang tua untuk mampu menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berarti perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi (pendidikan dan pekerjaan) orang tua tidak hanya berpengaruh terhadap pendidikan anak tetapi juga untuk pencapaian pekerjaan dan pendapatan mereka. Sedangkan faktor lain seperti: tempat tinggal, agama, status perkawinan dan status migrasi, serta umur sangat kecil pengaruhnya terhadap pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Banyak kaum migran tidak bisa bekerja dengan standar yang tinggi. Sementara persaingan untuk mencari lapangan kerja sangat tinggi dan kesemuanya dituntut dengan tingkat profesionalisme dan tingkat pendidikan pula yang harus dapat bersaing dengan orang lain. Di lain pihak kota-kota di Indonesia memiliki kelebihan jumlah tenaga kerja yang belum dapat tersalurkan baik yang memiliki pendidikan tinggi maupun mereka yang sama sekali tidak memiliki skill dan keterampilan yang tinggi untuk bisa bertahan pada jalur formal. Elemen lain yang juga menentukan adalah tidak adanya lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah.

Dampak dari akumulasi kejadian tersebut memunculkan angka pengangguran yang setiap tahunnya semakin bertambah.

Dari berbagai literatur tentang faktor-faktor kekumuhan, maka peneliti membatasi ruang lingkup studi yaitu lokasi, kependudukan, kondisi bangunan, kondisi sarana dan prasarana serta kondisi sosial ekonomi.

2.5 Klasifikasi Permukiman Kumuh

Terdapat beberapa klasifikasi dalam permukiman kumuh dilihat dari beberapa aspek menurut Prayitno (2016), yaitu:

- a. Dilihat dari pemetaan kondisi dan permasalahan lingkungan permukimannya.
- b. Dilihat dari aspek legalitas dan kerentanannya.
- c. Dilihat dari asal-usul dan umurnya.
- d. Dilihat berdasarkan lokasi dan letaknya.

2.5.1 Pemetaan Kondisi Dan Permasalahan Lingkungan Permukiman

Ditinjau dari pemetaan kondisi kawasan dan permasalahannya menurut Prayitno (2016), kawasan kumuh dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:

- a. Permukiman kumuh nelayan.
- b. Permukiman kumuh dekat dengan pusat kegiatan sosial-ekonomi.
- c. Permukiman kumuh pusat kota.
- d. Permukiman kumuh pinggiran kota.
- e. Permukiman kumuh daerah pasang surut.
- f. Permukiman kumuh daerah rawan bencana.
- g. Permukiman kumuh tepian sungai.

2.5.2 Aspek Legalitas dan Kerentanannya

Ditinjau dari aspek legalitas dan kerentanannya, kawasan kumuh dibedakan menjadi 2 kategori yaitu kawasan kumuh legal (formal) dan kawasan kumuh ilegal (informal). Kawasan kumuh legal lebih mudah dijumpai pada kawasan permukiman kampung tradisional yang memadat dan menjadi kumuh. Sedangkan kawasan ilegal dapat ditemui di beberapa kawasan yang tidak memiliki status tanah dan bangunan serta berlokasi pada umumnya di kawasan peruntukan nonpermukiman. Tingkat kerentanan antara kedua kawasan tersebut jelas berbeda. Kawasan kumuh informal tentu memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap penggusuran.

2.5.3 Asal-usul dan Umurnya

Ditinjau dari asal-usul dan umurnya, kawasan kumuh terlihat jelas pada sisi sejarah pembentukan pusat kota. Pembentukan kawasan modern saat ini lebih cenderung menjauh atau memisahkan diri dari kota asalnya. Hal ini justru menciptakan kesenjangan, terutama dalam hal penyediaan layanan dasar sehingga berdampak besar pada penurunan kondisi fisik kawasan tersebut karena faktor konsolidasi dan subdivisi lahan secara informal.

2.5.4 Lokasi dan Letaknya.

Ditinjau dari lokasi dan letaknya, kawasan kumuh dibedakan menjadi kawasan kumuh di pusat kota dan kawasan kumuh di pinggiran kota. Hal ini dapat dilihat di kota-kota besar seperti Kota Jakarta sebagai pusat kota yang memiliki kawasan kumuh yang banyak dihuni oleh perpaduan warga lama dan warga baru. Di sisi lain, kawasan seperti ini dapat dilihat pula di pinggiran Kota Jakarta seperti perbatasan antarkota.

2.6 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Penanganan kawasan permukiman kumuh menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2 tahun 2016 dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pemugaran.

Pemugaran dilakukan dengan melakukan perbaikan dan/ atau pembangunan kembali prasarana, sarana dan utilitas umum agar dapat berfungsi dengan optimal, untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.

2. Peremajaan.

Peremajaan dilakukan dengan melakukan penataan kembali secara menyeluruh, termasuk pembangunan baru prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.

3. Permukiman Kembali.

Permukiman kembali dilakukan dengan melakukan relokasi/ pemindahan secara menyeluruh terhadap masyarakat pada kawasan permukiman kumuh yang menempati kawasan yang peruntukannya bukan sebagai kawasan permukiman, ke lokasi baru untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.

Menurut Muta'ali dan Nugroho (2016) ada beberapa program penanganan kawasan kumuh di Indonesia:

a. Kampung Improvement Program (KIP)

Konsep program KIP telah ada sejak tahun 1917 saat pemerintah pusat memberikan surat pertama kepada dewan Kota Semarang dan Surabaya untuk melakukan perbaikan kampung dan hal ini direalisasikan pada tahun 1925 dengan KIP di Kota Surabaya. Keberhasilan KIP di Kota Surabaya menjadikan program KIP di tahun 1974 sebagai program nasional. Program KIP cenderung menjadi program inovatif yang lebih terfokus pada lingkungan permukiman kota yang mayoritas penghuninya adalah masyarakat miskin. Tujuan dasar pelaksanaan KIP adalah meningkatkan kondisi fisik lingkungan perumahan kampung melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan setapak, drainase, air bersih, sanitasi beberapa fasilitas kesehatan, dan pendidikan, di Indonesia, program ini dapat dikatakan terbukti ampuh dalam menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan kumuh sebelumnya.

b. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan Program Pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat sehingga dapat dibangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal (Laporan Peneliti Akselerasi Terpadu Penanganan Kawasan Kumuh, 2009). P2KP menganggap bahwa kemiskinan sebagai persoalan struktural dan

multidimensional yang meliputi politik, sosial, ekonomi, aset, dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat miskin sebagai masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan dalam upaya menyampaikan aspirasinya. P2KP memiliki konsep memfasilitasi rakyat serta pemerintah daerah agar mampu menangani akar penyebab kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) atau proses pembelaaran (*education*) masyarakat, dan penguatan kapasitas (*capacity building*) untuk mengedepankan peran pemerintah daerah.

- c. Program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Pelompok (P2BPK)
- Perumahan swadaya mulai diluncurkan pada tahun 1989 hingga 2000 melalui Program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK). Tujuan awal program ini adalah diharapkan sebesar 10% dari proporsi masyarakat MBR mampu membangun rumah swadaya melalui pemberian bantuan atau *stimulan* secara berkelompok. Dalam program tersebut masyarakat yang membutuhkan rumah diajak untuk membentuk kelompok bersama, embahas rencana yang diharapkan, kesesuaian dengan kebutuhan perumahan, meningkatkan pendapatan, menabung, mengurus kredit, dan membangun bersama. Kelompok ini memerlukan pendamping dari pihak swasta yang dapat diwakili oleh pengembang atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penataan bangunan dan lingkungan, pertanahan, dan pembiayaan dilakukan sejalan dengan perkembangan kota. Berdasarkan hasil implementasi P2BPK masih banyak program yang tujuannya bukan untuk

terbangunnya rumah layak huni melalui sistem swadaya secara utuh dan berkelanjutan tetapi kelemahannya adalah program ini hanya berfokus pada target pembangunan rumah secara kuantitas saja.

d. Program *Community-Based Initiatives for Housing and Local Development (Co-Bild)*

Program Co-Bild dikenal dengan Program Penerapan Pembangunan Perumahan dan Daerah pada Prakarsa Komunitas Masyarakat (P3DPK) yang dicetus pada tahun 2001 oleh direktur jenderal perumahan dan permukiman. Program ini bekerjasama secara rintisan (*pilot project*) antara Belanda, UNCHS (Habitat)/ UNDP, dan pemerintah Indonesia untuk membangun perumahan bagi MBR. Program *Co-Bild* di rancang untuk menguji kelayakan mekanisme keuangan perumahan berdasarkan tingkat bunga pasar dengan tujuannya yaitu memenuhi permintaan atas rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang memiliki kekuatan untuk menabung melalui penurunan biaya penyediaan perumahan atau dukungan penyediaan pinjaman berurutan. Terdapat tiga pilar program *Co-Bild*, yaitu sebagai berikut:

1. Dukungan pembangunan berbasis pada kelompok dimana masyarakat adalah pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program tersebut.
2. Kelembagaan *Co-Bild* yang dibentuk oleh masyarakat (KSM) berdasar prinsip demokrasi dan representasi wakil-wakil masyarakat peduli perumahan dan permukiman.

3. Mekanisme pembiayaan yang menyalurkan pinjaman dana bergilir pada kelompok sesuai dengan kemampuan anggotanya.

e. *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)*

NUSSP merupakan program ciptaan Depertemen Pekerjaan Umum (2006) yang diarahkan untuk perbaikan atau peningkatan lingkungan permukiman kumuh di permukiman desa dan kampung (kumuh perkotaan) yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat serta upaya penguatan kelembagaan pada tingkat komunitas untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dengan strategi pelaksanaan yang menggunakan pendekatan tridaya. Program NUSSP merupakan program perbaikan dan pembangunan rumah beserta sarana dan prasarna permukimannya.

f. *Slum Alleviation Policy and Action Plan (Sapola)*

Sapola merupakan kebijakan nasional dan rencana aksi yang dikembangkan Bappenas dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh perkotaan, terutama terkait *land tenure*, akses pembiayaan perumahan, dan stok rumah. Kebijakan ini berfokus pada peran pemerintah pusat dalam mendayagunakan pemerintah daerah dalam program peningkatan kualitas hidup masyarakat kumuh perkotaan dengan mentransformasikan status lahan menjadi ilegal dan diakui. Pendekatan yang digunakan dalam program Sapola adalah *participatory decision making*. Hal ini berarti membutuhkan partisipasi dari lembaga terkait di tingkat pusat. Tujuan program ini adalah (1) membangun kebijakan dan strategi perbaikan dan

pencegahan kawasan kumuh nasional. (2) meningkatkan kemampuan pemerintah lokal untuk mendorong perbaikan permukiman kumuh. (3) membangun kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan.

g. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Program PLP2L-BK yang dilaksanakan pada tahun 2010 bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak melalui efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penanganan serta menyinergikan tindakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan *Stakeholder* lainnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penanganan kawasan kumuh berbasis kawasan pada prinsipnya adalah upaya menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan. Untuk kawasan yang ingin mendapatkan fasilitas dari PLP2K-BK harus lebih dahulu memenuhi kriteria umum, wajib, dan kompetitif. Adapun kebijakan yang diterapkan dalam program ini adalah kabupaten/kota yang akan menggalakkan PLP2K-BK merupakan kabupaten/kota pemenang maupun hanya sebagai nominasi penghargaan Adiputera Puritama dan telah mengusulkan kegiatan PLP2K-BK atau sejenisnya kepada kementerian perumahan rakyat. Dalam pelaksanaannya, program ini dibantu oleh TPM yang dipilih oleh masyarakat setempat.

h. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan upaya yang dilakukan kementerian Pekerjaan Umum untuk menanggulangi kemiskinan di bidang perumahan dan permukiman. PNPM Mandiri perkotaan bertujuan untuk

1. Membantu percepatan penanggulangan kemiskinan dalam pemenuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau serta lingkungan yang sehat dan aman.
 2. Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman secara terpadu dan sinergi dari berbagai program pemberdayaan masyarakat.
 3. Mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni dan mengurangi luasan kawasan kumuh serta terpenuhinya kebutuhan rumah.
 4. Menyesuaikan spesifikasi daerah dengan SPM bidang perumahan.
- Sebelumnya PNPM Mandiri Perkotaan merupakan tranformasi dari P2KP pada tahun 2008. Kelemahan PNPM Mandiri Perkotaan adalah ada beberapa daerah yang melakukan kecurangan karena munculnya kelompok fiktif (peminjaman nama-nama orang lain yang dicatat sebagai anggota kelompok peminjam).

i. Program Kota Hijau

Konsep kota hijau (*green city*) merupakan konsep pengembangan perkotaan yang mengadopsi prinsip perencanaan kota yang progresif, implemantatif, dan berkelanjutan. Kota hijau adalah cerminan kota ramah lingkungan yang didesain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menghemat energi dan air. Untuk mewujudkan kota hijau, setiap

kota diharapkan dapat menerapkan standar lingkungan kota hijau dengan atribut *green planning and design*, *green bulding*, dan *green community*. Kota hijau dapat menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, yaitu dengan strategi-strategi berikut:

1. Aspek lokasi

Green planning and design (GDP) akan mengatasi persoalan ketidakteraturan bangunan dan tingginya kepadatan bangunan.

2. Aspek kualitas masyarakat

Green community menitikberatkan pada proses penyadaran masyarakat bahwa dengan meningkatkan kualitas lingkungan maka akan memberikan dampak pada kesejahteraan, peningkatan kualitas perumahan/permukiman, dan ekonomi.

3. Aspek hunian/rumah

Impelementasi *green buliding*, *green water*, *green energy*, dan *green waste* pada skala *household* akan membatasi persoalan buruknya kualitas fisik hunian/rumah, menjadikan lingkungan perumahan akan berkualitas dan nyaman.

4. Aspek sarana dan prasarana

Minimnya kuantitas pembinaan dan buruknya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh dapat diatasi dengan implementasi *green water*, *green waste*, *green energy* dan *green transportation* pada skala kawasan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan penanganan permukiman kumuh telah dilakukan oleh beberapa peneliti di masing-masing daerah yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut menggunakan analisis dengan pembahasan mengetahui tingkat kekumuhan suatu permukiman, sehingga diketahui tingkat kekumuhan mampu merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh. Adapun judul penelitian, sasaran, metode, hasil pembahasan serta nama peneliti terkait penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.3 penelitian terdahulu.



Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Elpidia Agatha Crysta, Yanto Budisusanto, 2017, Tugas Akhir Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Analisis tingkat kekumuhan dan pola penanganannya pada lokasi permukiman. (studi kasus: kelurahan keputih, surabaya)	Mengetahui klasifikasi tingkat kekumuhan dan pola penanganan	1. Tingkat kekumuhan 2. Pola sebaran kawasan kumuh 3. Pola penanganan kawasan kumuh	Metode analisis skoring dengan teknik analisis data kuantitatif	Tingkat kekumuhan di kelurahan keputih, kota surabaya dan pola penanganannya yang sesuai dengan hasil penetapan lokasi kawasan kumuh di kelurahan keputih, Kota Surabaya.
2	Donata Edsadova, Ir. Haryani, M.T, Ezra Aditia, S.T, M,Sc, 2016 Jurnal Universitas Bung Hatta, Padang	Strategi Penanganan kawasan permukiman kumuh di nagari painan selatan Kecamatan Jurai	Mengetahui bentuk tipologi serta strategi Penanganan yang dilakukan pada kawasan permukiman kumuh	1. tipologi kekumuhan 2. tingkat kekumuhan (bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, persampahan, ekonomi masyarakat, status tanah)	Metode analisis seperti metode deskriptif dan metode kuantitatif (analisis skoring)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa di kawasan studi memiliki kategori tipologi kekumuhan sedang. Penanganan yang akan dilakukan adalah bentuk penanganan permukiman kembali di kawasan kumuh dengan status lahan ilegal dengan skema pembangunan rumah susun sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan yang terdampak bersedia menjual bangunannya dengan harga murah dan sipemilik bangunan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa dengan harga murah. Dan untuk lahan yang legal dilakukan peremajaan kampung

3	Gerald Mingki, Veronica Kumurur & Esli Takumansang, 2015, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis tingkat kekumuhan permukiman masyarakat di Kelurahan tanjung merah kota bitung	Menganalisis Tingkat kekumuhan di Daerah Permukiman yang terletak di Kelurahan tanjung merah, Kecamatan matuari, Kota bitung, Provinsi sulawesi utara	Tingkat kekumuhan	Metode analisis deskriptif dan scoring/ pembobotan	Hasil nya diperoleh bahwa daerah kelurahan tanjung merah Memiliki tingkat kekumuhan sedang, dengan aspek drainase dan sampah Memperoleh bobot yang tinggi.
4	Elpidia Agatha Crysta, 2016, Jurnal Institut Teknologi Sepuluh Nopember.	Analisis tingkat kekumuhan dan pola penanganannya (studi kasus: kelurahan keputih, surabaya)	Menganalisis Tingkat kekumuhan dan Merumuskan pola penanganan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kekumuhan - Pola sebaran kawasan kumuh - Pola penanganan kawasan kumuh 	Metode analisis dekriptif-kuantitatif skoring	Hasil penelitian menunjukkan di kelurahan keputih hanya menghasilkan dua klasifikasi tingkat kekumuhan, 14 rt termasuk dalam bukan kawasan kumuh dengan luas total wilayah permukiman 39,839 ha dan 10 rt termasuk dalam kawasan kumuh ringan dengan luas total wilayah permukiman 21,137 ha. Sedangkan dari rencana pola penanganan didapatkan, 2 wilayah rt perlu pemugaran, 6 wilayah rt dilakukan permukiman kembali dan 2 wilayah rt perlu dilakukan pemugaran dan permukiman kembali.

5	Dhea M. Darmisi, Veroniva A. Kumurur, Rieneke L.E. Sela, 2014 (Jurnal)	Analisis faktor-faktor kekumuhan kawasan Permukiman Pesisir Tradisional Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo	Mengidentifikasi faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Dan Menganalisis faktor-faktor Dominan kekumuhan di kawasan permukiman	Faktor-faktor penyebab terjadinya kawasan permukiman kumuh	Metode deskriptif, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder, analisis data, interpretasi hasil analisis sebagai penarikan kesimpulan	Faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Kecamatan Timula Kabupaten Boalemo
6	Dhea Putri Asmitha ST, 2019, Universitas Islam Riau	Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh kota di Kecamatan Tembilihan Hulu	<ul style="list-style-type: none"> - Teridentifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh - Teridentifikasi tipologi kekumuhan kawasan permukiman kumuh - Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman Kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi eksisting - Tipologi kekumuhan - Tingkat kekumuhan - Rumusan Strategi 	Metode analisis dekriptif kualitatif kuantitatif skoring	Hasil perhitungan tingkat kekumuhan kawasan di Kelurahan Tembilihan Hulu ini dengan hasil total nilai sebesar 45 yaitu tingkat kekumuhan kumuh sedang, rata-rata kekumuhan sektoran sebesar 50,90%, dan kontribusi penanganan sebesar 0,00%, sedangkan dari aspek legalitas tanah yaitu (+) positif dengan status tanah legal dan hasil dari aspek pertimbangan lain yaitu sebesar 13 dengan pertimbangan lain tinggi

			- Merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh			
--	--	--	---	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis 2021



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam “ Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru.” Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mix method) dengan pendekatan deskriptif menurut Nawawi (2015). Dalam metode analisis deskripsi kuantitatif, metode tersebut terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang beragam dari berbagai aspek yang terkait untuk membentuk gambaran atau situasi terkini dari wilayah penelitian, kemudian menggunakan pedoman analisis untuk menilai tingkat kekumuhan pada wilayah yang bersangkutan. PUPR. peraturan. 02 / PRT / M/2016 sehingga Anda dapat menggunakan variabel dan deskripsi statistik untuk menjelaskan kejadian di lapangan secara terstruktur dan terstandar.

Filsafat positivisme memandang realitas/ gejala/ fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representative. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Untuk mengumpulkan data digunakan instrument penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial (Sugiyono, 2012).

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa quisioner, observasi lapangan dan dokumentasi gambar.

Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah angket dan instrument yang telah tersandar.

3.2 Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif kuantitatif. Pendekatan itu sendiri pada dasarnya penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono 2010).

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian pada kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti, Kota Pekanbaru .

3.4 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah terhitung pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020. Dimana selama 3 bulan peneliti mencari keperluan data yang tercantum dalam list data,serta melakukan observasi lapangan dengan mendapatkan keadaan sebenarnya pada lokasi penelitian .

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dibagi ke dalam 2 (dua) kegiatan, adalah sebagai berikut :

3.5.1 Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan untuk mengumpulkan pendapat orang yang diwawancarai tentang objek penyelidikan. Lihatlah sumber data yang diperoleh dari survei lapangan langsung dari subjek penelitian. Bentuk-bentuk pengumpulan data mentah adalah:

- **Observasi Lapangan**, ialah penelitian yang dilaksanakan secara langsung dengan mengamati kondisi eksisting seluruh wilayah yang dikaji, dalam hal ini terkait permukiman kumuh yang ada di kelurahan kajian yakni Kelurahan Sri Meranti dengan alat bantu *form* penilaian kekumuhan yang terkait dengan kondisi bangunan, jaringan jalan, drainase, dan lainnya.
- **Dokumentasi**, merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting permukiman yang ada di kelurahan kajian yakni Kelurahan Sri Meranti dan juga dapat menjadi bukti faktual terkait gambaran daerah kajian.
- **Wawancara/Interview**, wawancara dan tanya jawab dilakukan terhadap responden khususnya terhadap perangkat pemerintahan, dimulai dari dinas perumahan dan permukiman, Kelurahan Sri Meranti, hingga tingkatan RT/RW dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak terkait yang representatif dan dianggap dapat melengkapi data terkait dengan kondisi atau gambaran permukiman setempat.
- **Kuesioner**, penyebaran kuesioner ini dilakukan terhadap masyarakat yang berada pada kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sri Meranti dengan melibatkan pihak kelurahan maupun ketua RT yang terkait dengan indikator permukiman kumuh baik bangunan, jaringan jalan, drainase kondisi sanitasi/limbah, air minum, persampahan dan prasarana proteksi kebakaran.

3.5.2 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan beberapa cara, termasuk investigasi kajian pustaka atau studi literatur ketika memeriksa sumber-sumber teoretis dalam bentuk majalah dan buku teks. Dokumen-dokumen yang digunakan termasuk pemukiman pesisir, pemukiman kombinasi lingkungan marginal, bencana pantai, transfer, perjanjian regional, dan teori penelitian terkait lainnya. Hasil survei sekunder ini dapat mendukung atau menyelesaikan hasil survei utama yang dilakukan. data sekunder, Institut Adaptasi, Spasial dan Konfigurasi Nasional, Statistik Tengah, Bappa, Bappata, Bappeda, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, Kantor Kecamatan, dan kantor kelurahan.. Data data yang diperlukan terkait dengan cakupan lahan, kompatibilitas lingkungan perumahan, kondisi populasi, vitalitas ekonomi dan arsitektur. .

3.6 Teknik *Sampling*

Cara pengambilan sampel disebut teknik *sampling* atau teknik pengambilan sampel. Sampel harus valid, yaitu dapat mengukur apa yang perlu diukur. Sampel yang efektif ditentukan oleh dua pertimbangan, yaitu:

- Akurasi atau akurasi, yaitu sejauh mana tidak ada “bias” (kesalahan) dalam sampel. Dengan kata lain, semakin kecil kesalahan dalam sampel, semakin akurat sampel tersebut.
- presisi Kriteria kedua dari sampel yang baik adalah memiliki tingkat akurasi estimasi tertentu. presisi mengacu pada kedekatan perkiraan kami dengan karakteristik keseluruhan.

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu pemilihan sampel probabilistik dan pemilihan sampel non-probabilistik. Perbedaan utama antara kedua metode tersebut adalah probabilitas bahwa setiap elemen dalam populasi dipilih sebagai objek sampel.

Metode probabilistik memberikan kesempatan yang sama untuk mengambil sampel setiap item dalam populasi dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak. Sampel yang dipilih dengan metode non-probabilitas tidak acak, sehingga setiap item dalam populasi memiliki peluang yang berbeda untuk dipilih sebagai sampel. akan mengadopsi metode simple random sampling untuk mendapatkan data komunitas berdasarkan setiap elemen dalam total populasi dengan probabilitas yang sama untuk dipilih. Anggota sampel dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sementara itu, keterbatasan metode intensional sampling adalah tidak dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi, terutama untuk menggali data dan informasi instansi terkait. Identifikasi ciri-ciri orang yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (*Purposive Sampling*)

Purposive Sampling Mengumpulkan data melalui wawancara dengan instansi ini untuk mencari informasi terkait profil permukiman kumuh di kota Pekanbaru, dengan menggunakan desa Sri Meranti sebagai contoh. Informasi yang diharapkan dapat diperoleh melalui wawancara dengan instansi, seperti instansi yang terkait dengan penataan kawasan kumuh, tata kota Pekanbaru untuk penanganan kawasan kumuh khususnya di lokasi penelitian yaitu Desa Sri Meranti. Yang diwawancarai adalah manajer lapangan/bagian atau level staf yang benar-benar memahami dan menguasai informasi yang ingin diperolehnya. Pembicara sasaran adalah penanggung jawab wilayah pelayanan penataan ruang

dan permukiman, serta penanggung jawab wilayah lokasi penelitian dan penanggung jawab RT.

2. Masyarakat (*Simple Random Sampling*)

pengambilan data terhadap masyarakat melalui penyebaran kuisioner pada kelurahan kajian yakni Kelurahan Sri Meranti ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik masyarakat untuk mengetahui informasi serta gambaran eksisting diantaranya terkait pekerjaan, kondisi hunian (air bersih dan limbah), status kepemilikan rumah, pengelolaan persampahan, prasarana proteksi kebakaran serta data serta informasi yang diperlukan dalam proses analisis terkait permukiman kumuh pada daerah kajian. Adapun form kuesioner yang akan disebar terdapat pada lampiran.

3.5.3 Penetapan Sampel

Dalam penetapan sampel ini peneliti menggunakan jumlah populasi berdasarkan jumlah kepala rumah tangga yang dipertimbangkan dapat menjadi representatis dari jumlah bangunan/rumah yang ada pada lokasi kajian Kelurahan Sri Meranti memiliki 4043 rumah tangga. Adapun dalam penetapan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan metode Slovin. Penggunaan metode ini selain sudah banyak digunakan dalam proses penetapan sampling pada banyak penelitian terdahulu juga peneliti mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya

baik materil maupun non materil dalam proses penelitian ini. Berikut uji penetapan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Ket : N : Populasi (unit rumah tangga)

n = Besar sampel

d = ∞ = 0,05/0,1

Kelurahan Sri Meranti:

$$n = \frac{4043}{1 + 4043 (0.1^2)} = 98$$

Maka pada Kelurahan Sri Meranti dibutuhkan sampel sebanyak 98 KK dengan *margin error* sebesar 10% atau dengan kata lain memiliki tingkat validitas sebesar 90%.

3.6 Metode Analisis

Di dalam metode analisis ini digunakan cara yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan di dalam penelitian ini. Adapun analisis pengolahan data yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

3.6.1 Menganalisis Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti

Dalam menganalisis tingkat kekumuhan ini menggunakan analisis tingkat kekumuhan melalui analisis skoring dengan pembobotan. Dalam proses analisis tingkat kekumuhan ini menggunakan beberapa variabel yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016. Dalam penelitian ini terdapat beberapa model analisis hubungan antara variabel. Variabel-variabel tersebut melalui analisis skoring tingkat

kekumuhan dengan dilakukan analisis tingkat kekumuhan untuk mengetahui tingkat kekumuhan yang terdapat di Kelurahan Sri Meranti. Selanjutnya dilakukan kriteria untuk melakukan analisis skoring terhadap tingkat kekumuhan yang terdapat di wilayah penelitian.

Analisis skoring dilakukan dengan menilai kondisi kondisi eksisting terhadap kriteria/indikator yang di tetapkan oleh peneliti berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 mengenai penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dijabarkan sebelumnya. Nilai bobot tersebut akan mencerminkan tingkat kekumuhan pada masing-masing variabel yang digunakan. Masing-masing variabel dalam analisis skoring ini memiliki parameter. Penilaian akan dilakukan melalui observasi penelitian dengan skala penilaian tiap-tiap variabel adalah 5,3, dan 1.

1. Analisis Skoring (Pembobotan)

Berikut ini merupakan berbagai macam perhitungan yang digunakan untuk melakukan skoring (pembobotan) pada setiap aspek yang dilakukan melalui observasi lapangan oleh peneliti. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016 terdapat beberapa perhitungan pada setiap aspek di setiap kriteria dan nilai numeriknya untuk menghitung tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh pada tabel 3.1 rumus perhitungan tingkat kekumuhan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumus Perhitungan Tingkat Kekumuhan

No	Aspek	Kriteria	Nilai Numerik	Satuan	Perhitungan Persentasi (%)
1	Bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	Unit	$\frac{< \text{Bangunan tidak teratur (unit)}}{< \text{Bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
		Tingkat kepadatan bangunan	Luas kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Ha	$\frac{\text{Luas kawasan } 200-250 < \text{unit-Ha}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan Teknis	Unit	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
2	Jalan lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Panjang jalan ideal (m) - Panjang jalan eksisting (m)	M	$\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan eksisting (m)}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan rusak	M	$\frac{\text{Panjang jalan rusak}}{\text{Panjang jalan ideal}} \times 100\%$
3	Penyediaan air minum	Ketidaksiediaan akses aman air minum	< KK tidak terakses air minum aman	KK	$\frac{< \text{KK tidak terakses air minum aman}}{< \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
		Tidak terpenuhi kebutuhan air minum	< kk tidak terakses air minum cukup	KK	$\frac{\text{KK tidak terakses air minum aman}}{< \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
4	Drainase lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan	Ha	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$
		Ketidakterseediaan drainase	Panjang drainase ideal (m) - Panjang drainase eksisting (m)	M	$\frac{\text{Panjang drainase ideal (m)} - \text{Panjang drainase eksisting (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
		Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	Panjang drainase akses ke sistem kota	M	$\frac{\text{Panjang drainase penghubung}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times 100\%$
		Tidak terpeliharanya Drainase	Panjang drainase tidak Terpelihara	M	$\frac{\text{Panjang sistem drainase tidak terpelihara}}{\text{Panjang drainase total}} \times 100\%$
		Kualitas konstruksi Drainase	Panjang drainase rusak	M	$\frac{\text{Panjang drainase yang buruk}}{\text{Panjang drainase total}} \times 100\%$

No	Aspek	Kriteria	Nilai Numerik	Satuan	Perhitungan Persentasi (%)
5	Pengelolaan air limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah kk dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sistem air limbah tdk sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar Teknis	Jumlah kk dengan prasarana dan sarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KKKeseluruhan}} \times 100\%$
6	Pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai standar teknis	Jumlah kk dengan Sarana dan prasarana pengeolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sarpras pengeolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
		Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Jumlah kk dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KKKeseluruhan}} \times 100\%$
		Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah kk dengan Sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak terpelihara	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara}}{\text{Jumlah KKKeseluruhan}} \times 100\%$
7	Proteksi kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit	$\frac{\text{Jumlah bangunan tdk terlayani sarana proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah bangunan Keseluruhan}} \times 100\%$
		Ketidakterediaan sarana proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi Kebakaran	Unit	$\frac{\text{Jumlah bangunan tdk terlayani prasarana proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah bangunan Keseluruhan}} \times 100\%$

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016

3.6.2 Merumuskan Arah Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti

Dalam proses perumusan strategi penanganan ini menggunakan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian tujuan yaitu menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti.

sehingga dapat disesuaikan strategi apa yang tepat sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016.

3.7 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Wirartha (2006) variabel sering dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teori dan ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Lebih lanjut dikatakan variabel dalam penelitian dapat dikategorikan menjadi empat klasifikasi, yaitu : variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval dan variabel rasio. Berikut ini merupakan tabel variabel penelitian :

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Tujuan	Variabel	Indikator	Data	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Teknik Analisis	Hasil
Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti	Tingkat Kekumuhan	1. Bangunan Gedung 2. Jalan Lingkungan 3. Air Minum 4. Drainase 5. Air Limbah 6. Persampahan 7. Proteksi Kebakaran 8. RTH	Data Primer	Masyarakat, RT, Kelurahan, Dinas Perkim,	Observasi, wawancara, Kuesioner	Analisis Skoring	tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti
Merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti	Arahan Penanganan	Tingkat Kekumuhan	Data primer Data Sekunder	Masyarakat, RT, Dinas terkait, Dokumen	1. Wawancara 2. Kunjungan Dinas	Deskriptif Kualitatif	Rumuasan arahan penanganan

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dulunya bernama “Senapelan” dan dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Batin. Kawasan ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan akhirnya menjadi Dusun Payung Sekaki, di antaranya terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, perjanjian antara Kerajaan Johor dan Belanda (VOC) diperbarui, di mana Belanda memperoleh hak yang lebih besar. Ini termasuk pembebasan pajak dan monopoli untuk beberapa jenis barang yang diperdagangkan. Selanjutnya Belanda juga mendirikan pabrik di Pita Pahan, yang merupakan daerah maju dan sangat penting pada saat itu.

Karena kapal-kapal Belanda tidak dapat memasuki Petapahan, Senaperand menjadi persinggahan kapal-kapal Belanda, dan perjalanan ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Keadaan ini menjadikan Payung Sekaki atau Senapelan sebagai tempat penyimpanan berbagai barang niaga, baik dari luar ke dalam, maupun dari dalam berupa bahan tambang, seperti timah, emas, kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan terus tumbuh dan memainkan peran penting dalam lalu lintas komersial. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang membuat kota ini dilintasi dari pedalaman Tapung serta Minangkabau dan Kampar. juga mendorong pengembangan fasilitas jalan melalui jalur Teratak Buluh (Sungai Kelut), Tangkerang hingga Senapelan

sebagai kawasan strategis dan pintu gerbang komersial yang penting. Perkembangan Senapelan sangat dekat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sejak Sultan Abdul Garil Almaty Shah menetap di Senapelan, ia membangun sebuah istana di Kampung Bukit, yang diperkirakan terletak di dekat lokasi Masjid Agung saat ini.

Sultan kemudian berinisiatif membuat akhir pekan atau pasar di Senapella, namun tidak berkembang. Kemudian, putranya Raja Muda Muhammad Ali melanjutkan upaya perintisannya. Meskipun posisi pasar pindah ke dekat pelabuhan Pekanbaru saat ini, ia masih memiliki Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muzan Gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah.

Akhirnya, menurut catatan Imam Suhil Siak, Senapelan (kemudian lebih dikenal sebagai Pekanbaru) resmi didirikan pada Selasa, 21 Rajab 1204 dan 23 Juni 1784. Ditulis oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah Sultan Yahya. Ia kemudian menamakannya sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Setelah kepergian Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, kendali Senapelan dialihkan kepada walikota dan empat kakek-nenek Assista, yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri, hanya untuk menemani walikota. Keempat kakek-nenek tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak, dan proses pemerintahan sepenuhnya berada di tangan walikota. Selain itu perkembangan pemerintahan kota Pekanbaru mengalami perubahan yaitu :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang

Controleur berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi memakai sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.



4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

Di Kota Pekanbaru sendiri memiliki kondisi geologi yang keadaannya relatif daerah datar dengan Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, dan untuk daerah pinggiran kota pada umumnya memiliki kondisi geologi yang terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

Sedangkan untuk kondisi iklimnya, Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berada pada bulan April dan suhu minimum di bulan Agustus 2018. Kota Pekanbaru mempunyai Letak dan luas antara: $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru merupakan kota yang termasuk wilayah yang luas dan berkembang di Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya berikut Tabel 4.1 luas wilayah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2019

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Tampan	Simpang Baru	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	43,24	6,84
3	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	Kulim	171,27	27,09
6	Limapuluh	Rintis	4,04	0,64
7	Sail	Cinta Raja	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26	0,36
9	Sukajadi	Pulau Karam	3,76	0,59
10	Senapelan	Kampung Bandar	6,65	1,05
11	Rumbai	Rumbai Bukit	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	157,33	24,88
Total			632,26	100

Sumber: BPS, 2019

Sedangkan untuk mengetahui jumlah kelurahan serta jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru berikut Tabel 4.2 jumlah kelurahan dan jumlah penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Tampan	9	307.947
2	Payung Sekaki	7	91.255
3	Bukit Raya	5	105.177
4	Marpoyan Damai	6	131.550
5	Tenayan Raya	13	167.929
6	Limapuluh	4	41.466
7	Sail	3	21.492
8	Pekanbaru Kota	6	25.103
9	Sukajadi	7	47.420
10	Senapelan	6	36.581
11	Rumbai	9	67.654
12	Rumbai Pesisir	8	73.784
Total		83	1.117.359

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 bahwa Kota Pekanbaru itu sendiri terdiri dari 12 kecamatan dengan 83 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 1.117.359 jiwa.

4.1.3 Pendidikan

Kota Pekanbaru memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang penyebaran fasilitas tersebut tidak menyebar secara rata. Mulai dari fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK baik yang negeri ataupun swasta. Berikut Tabel 4.3 jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Pekanbaru Tahun 2018

Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Total
1	Tampan	53	22	12	17	104
2	Payung Sekaki	24	15	6	6	51
3	Bukit Raya	24	10	5	5	44
4	Marpoyan Damai	37	13	7	9	66
5	Tenayan Raya	35	18	6	7	66
6	Limapuluh	22	10	4	1	37
7	Sail	8	4	4	4	20
8	Pekanbaru Kota	10	2	1	-	13
9	Sukajadi	27	10	4	4	45
10	Senapelan	16	6	4	3	29
11	Rumbai	19	8	2	1	30
12	Rumbai Pesisir	26	13	6	1	46
Total		301	131	61	58	551

Sumber: BPS, 2019

4.1.4 Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru

Penggunaan lahan terbangun (*built-up areas*) di Kota Pekanbaru yakni sekitar 24% dari luas wilayah kota yang didominasi sebagai kawasan perumahan/permukiman (sekitar 73% dari luas areal terbangun), pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer, bandara, dan lain-lain. Sedangkan luas areal belum terbangun (*non-built up areas*) di Kota Pekanbaru yakni sekitar 76% dari luas wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung, perkebunan, semak belukar, dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan Rumbai), Tenayan Raya dan sekitarnya. Jenis penggunaan lahan tersebut seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
A.	Lahan Terbangun (<i>built up areas</i>)	
1.	Kawasan Perumahan	372,16
2.	Kawasan Pemerintahan	3,43
3.	Kawasan Pendidikan	5,84
4.	Kawasan Perdagangan	10,68
5.	Kawasan Industri	17,58
6.	Militer	2,85
7.	Bandara	3,76
8.	Lain-lain	119,88
B.	Lahan Tidak Terbangun (<i>non-built up areas</i>)	
1.	Kawasan Lindung	26,75
2.	Kawasan Perkebunan	18,37
3.	Kawasan Semak Belukar	24,73
4.	Hutan	26,23
Total		632,26

Sumber: *Draf RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2032*

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rumbai

4.2.1 Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Rumbai

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru dengan memiliki luas wilayah sebesar 128,85 km². Saat ini Kecamatan Rumbai memiliki 9 kelurahan serta memiliki 281 RT dan 73 RW. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Payung Sekaki

Pada awalnya Kecamatan Rumbai terdiri dari 5 kelurahan. Namun pada tahun 2017 3 kelurahan dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai dimekarkan menjadi 4 kelurahan lagi yaitu (Kelurahan Rumbai Bukit di pecah menjadi Kelurahan Maharani dan Kelurahan Rantau Panjang, untuk Kelurahan Agrowisata merupakan pecahan dari Kelurahan Rumbai Bukit dan Kelurahan Palas serta Kelurahan Muara Fajar dipecah menjadi Kelurahan Muara Fajar Timur dan Kelurahan Muara Fajar Barat. Untuk lebih jelasnya berikut Tabel 4.5 luas wilayah dan persentase luas wilayah menurut kelurahan di Kecamatan Rumbai tahun 2019.

Tabel 4.5 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Tahun 2019

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Luas Wilayah (%)
1	Umban Sari	9,30	7,22
2	Rumbai Bukit	11,03	8,56
3	Muara Fajar Timur	15,41	11,96
4	Palas	24,20	18,78
5	Sri Meranti	10,40	7,25
6	Agrowisata	16,89	13,11
7	Maharani	37,42	5,76
8	Rantau Pnajang	11,16	8,66
9	Muara Fajar Barat	24,10	18,70
Total		128,85	100,00

Sumber: BPS, 2019

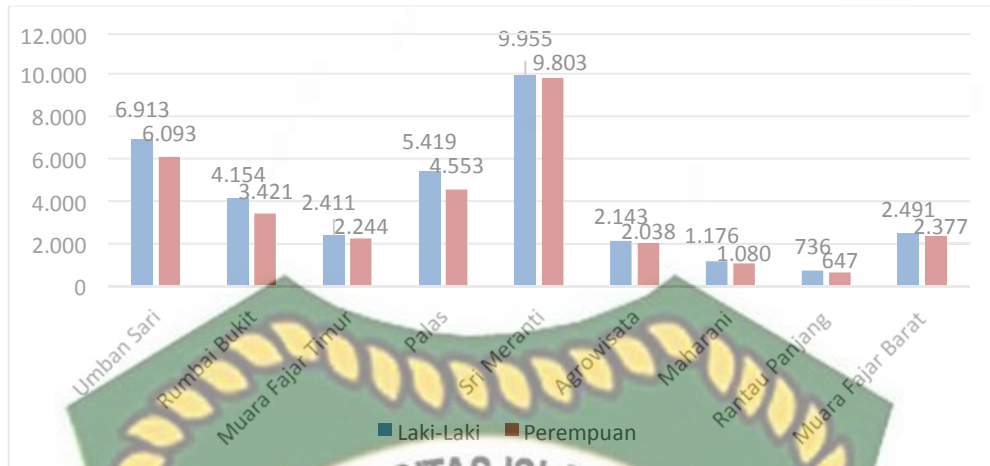
4.2.2 Kependudukan

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk yang mencapai 67.654 jiwa dengan kelurahan yang terpadat dalah Kelurahan Sri Meranti sebesar 19.758 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen dari tahun 2017. Sedangkan kepadatan penduduknya mencapai 525 jiwa. Berikut Tabel 4.6 jumlah penduduk menurut kelurahan dan jenis kelamin di Kecamatan Rumbai tahun 2019

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Rumbai Tahun 2019

No	Kelurahan	Jumlah Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Umban Sari	6.913	6.093	13.006
2	Rumbai Bukit	4.154	3.421	7.575
3	Muara Fajar Timur	2.411	2.244	4.655
4	Palas	5.419	4.553	9.972
5	Sri Meranti	9.955	9.803	19.758
6	Agrowisata	2.143	2.038	4.181
7	Maharani	1.176	1.080	2.256
8	Rantau Pnajang	736	647	1.383
9	Muara Fajar Barat	2.491	2.377	4.868
Total		35.398	32.256	67.654

Sumber: BPS, 2019



Sumber: BPS, 2019

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Dan Jenis Kelamin di Kecamatan Rumbai Tahun 2019

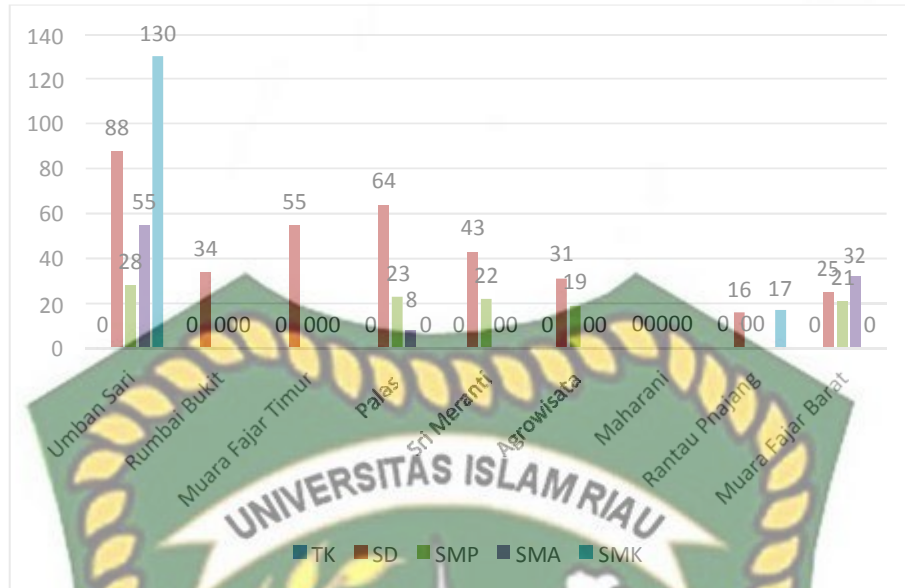
4.2.3 Pendidikan

Kecamatan Rumbai memiliki beberapa fasilitas pendidikan. Di Kecamatan Rumbai fasilitas pendidikan tidak menyebar secara rata. di Kecamatan Rumbai tidak memiliki fasilitas pendidikan TK, untuk fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK hanya fasilitas pendidikan SD saja yang menyebar hampir di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai baik yang negeri ataupun swasta. Berikut Tabel 4.7 jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Rumbai Tahun 2019

Tabel 4.7 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Rumbai Tahun 2019

No	Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	Total
1	Umban Sari	0	88	28	55	130	301
2	Rumbai Bukit	0	34	0	0	0	34
3	Muara Fajar Timur	0	55	0	0	0	55
4	Palas	0	64	23	8	0	95
5	Sri Meranti	0	43	22	0	0	65
6	Agrowisata	0	31	19	0	0	50
7	Maharani	0	0	0	0	0	-
8	Rantau Pnajang	0	16	0	0	17	33
9	Muara Fajar Barat	0	25	21	32	0	78
Total		0	356	113	95	147	711

Sumber: BPS, 2019



Sumber: BPS, 2019

Gambar 4.2 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Kelurahan di Kecamatan Rumbai Tahun 2019

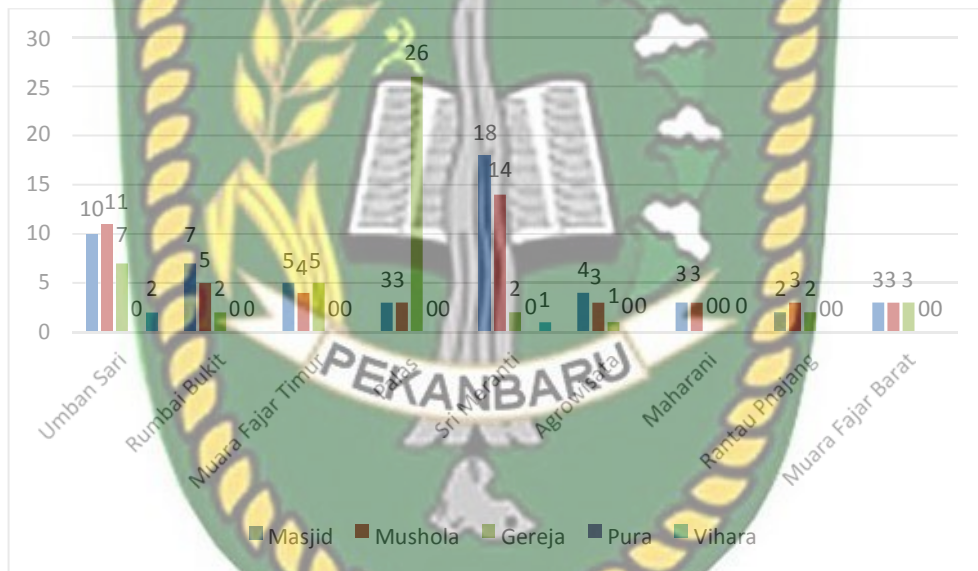
4.2.4 Peribadatan

Kecamatan Rumbai memiliki keragaman penduduk dalam suku dan latar agama kepercayaan yang berbeda-beda. Penduduk di Kecamatan Rumbai mayoritas masyarakatnya yaitu beragama islam. Hal itu dilihat dari fasilitas peribadatan yang lebih banyak masjid/mushola. Selain itu di Kecamatan Rumbai memiliki fasilitas peribadatan yang lain seperti gereja, pura dan vihara. Berikut Tabel 4.7 jumlah fasilitas peribadatan menurut kelurahan di Kecamatan Rumbai tahun 2019

Tabel 4.8 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Tahun 2019

No	Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara	Total
1	Umban Sari	10	11	7	0	2	30
2	Rumbai Bukit	7	5	2	0	0	14
3	Muara Fajar Timur	5	4	5	0	0	14
4	Palas	3	3	26	0	0	32
5	Sri Meranti	18	14	2	0	1	35
6	Agrowisata	4	3	1	0	0	8
7	Maharani	3	3	0	0	0	6
8	Rantau Pnajang	2	3	2	0	0	7
9	Muara Fajar Barat	3	3	3	0	0	9
Total		55	49	48	0	3	155

Sumber: BPS, 2019



Sumber: BPS, 2019

Gambar 4.3 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Rumbai Tahun 2018

4.3 Gambaran Umum Kelurahan Sri Meranti

4.3.1. Sejarah Kelurahan Sri meranti

Kelurahan Sri meranti dahulunya adalah termasuk wilayah di Kecamatan Rumbai, namun setelah dilakukannya pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Rumbai, Kelurahan Sri meranti masuk sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Rumbai.

4.3.2. Letak Geografi Kelurahan Sri meranti

Kelurahan Sri meranti merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Rumbai. Kelurahan Sri meranti ini terdiri atas 20 RW dan 89 RT. Kelurahan Sri meranti mempunyai luas daerah sebesar 10,40 Ha.

Berikut batas-batas Kelurahan Sri meranti sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Umban Sari
- b. Sebelah Selatan : Sungai Siak
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Meranti Pandak
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Palas

4.3.3. Kependudukan Kelurahan Sri meranti

Jumlah penduduk Kelurahan Sri meranti mencapai 19.743 jiwa pada tahun 2019. Berikut tabel jumlah penduduk Kelurahan Sri meranti:

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Kelurahan Sri meranti

No.	Tahun 2019	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelurahan Sri meranti	9.955	9.803	19.758

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sri meranti yang berjenis laki-laki lebih banyak yakni 9.955 jiwa dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 9.803 jiwa.

4.3.4. Sarana Kelurahan Sri meranti

A. Sarana Pendidikan

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kelurahan Sri meranti dapat dilihat dari publikasi data yang disajikan dalam bentuk data sarana pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Sri meranti sebagai berikut:

Tabel 4.10 Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Sri meranti

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	0
2.	Sekolah Dasar (SD)	2
3.	SMP/MTs	1
4.	SMA/MA	0
5.	SMK	0
6.	Perguruan Tinggi	0
	Jumlah	3

Sumber: Data BPS, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Sri meranti tidak terdapat sarana pendidikan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Perguruan Tinggi. Sedangkan sarana pendidikan yang paling banyak terdapat di Kelurahan Sri meranti yaitu sarana Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 unit.

B. Sarana Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat

yang baik. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Sri meranti sebagai berikut:

Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan Kelurahan Sri meranti

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	0
2.	Rumah Sakit Bersalin	0
3.	Puskesmas/Pustu	1
4.	Poliklinik/Balai Pengobatan	0
5.	Praktek Dokter	0
	Jumlah	1

Sumber: Data BPS, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Sri meranti hanya memiliki 1 (satu) sarana kesehatan yaitu Puskesmas/Pustu.

C. Sarana Peribadatan

Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Kelurahan Sri meranti adalah 13 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.12 Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Sri meranti

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	7
2.	Musholla	3
3.	Gereja	3
4.	Lainnya	0
	Jumlah	13

Sumber: Data BPS, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana peribadatan yang paling banyak terdapat di Kelurahan Sri meranti adalah Masjid sebanyak 7 unit yang tersebar di Kelurahan Sri meranti karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

D. Sarana Perekonomian

Adapun jumlah sarana perekonomian yang ada di Kelurahan Sri meranti sebanyak 149 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.13 Jumlah Sarana Perekonomian Kelurahan Sri meranti

No.	Sarana Ekonomi	Jumlah
1.	Pasar	1
2.	Bank	0
3.	Toko	26
4.	Warung/Kios	121
	Jumlah	148

Sumber: Data BPS, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana perekonomian yang paling banyak terdapat di Kelurahan Sri meranti adalah Warung/Kios sebanyak 121 unit, Toko sebanyak 26 unit, Bank sebanyak 2 unit, sedangkan Pasar tidak terdapat di Kelurahan Sri meranti.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil analisis mengenai kawasan kumuh sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian meliputi (1) Menganalisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti (2) Merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti.

5.1 Menganalisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti

Sebelum dilakukannya perhitungan tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti maka terlebih dahulu dilakukannya identifikasi kondisi eksisting permukiman kumuh guna mendapatkan gambaran secara rinci mengenai kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti. Kondisi eksisting akan dibahas secara menyeluruh tiap tiap RT/RW pada permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti.

5.1.1 Identifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti

Didahului dengan identifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti maka diharapkan dapat menjadi gambaran bagaimana kondisi kawasan permukiman kumuh dilapangan. Dengan ditampilkan secara visual diharapkan dapat menggambarkan masing-masing indikator permasalahan yang terjadi di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti mulai dari kondisi jaringan jalan, jaringan drainase, air bersih, persampahan, proteksi kebakaran, sanitasi dan ketersediaan RTH.

5.1.1.1 Gambaran Kawasan Kumuh dan kondisi bangunan

Gambaran kawasan kumuh pada di Kelurahan Sri Meranti, meliputi gambaran umum terhadap kondisi permukiman, serta kondisi sosial dan kependudukan.

Kondisi permukiman secara umum pada kawasan kumuh tidak begitu padat, untuk status kepemilikan rumah didominasi oleh rumah sewa 35%, dan rumah milik sendiri 65%. Jumlah penduduk di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sri Meranti sebanyak 1.252 jiwa terdiri dari 352 KK. Dengan luas kawasan permukiman kumuh sebesar 7,6 Ha. Secara umum, pendapatan rata-rata penduduk pada kawasan ini berkisar antara 1 hingga 3 juta tiap bulan. Komposisi penduduk asli/tempatan dan penduduk pendatang pada kawasan tersebut 97% merupakan penduduk asli/tempatan sedangkan 3% merupakan penduduk pendatang. Mata pencaharian masyarakat pada kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sri Meranti didominasi bekerja pada sektor perdagangan dan jasa, nelayan, bertani/berkebun.

5.1.1.2 Bangunan Gedung

a) Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan dilihat berdasarkan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman kumuh di lokasi penelitian apabila tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Berdasarkan hasil observasi lapangan ketidakteraturan bangunan di lokasi penelitian yaitu terdapat ketidaksesuaian yang ditinjau dari bentuk dan peletakan bangunan dimana jumlah

ketidakteraturan sebanyak 65 unit bangunan. Berikut gambar 5.1 kondisi ketidakteraturan bangunan.



Gambar 5.1 Foto Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber : Hasil survei primer, 2021

b) Tingkat Kepadatan Bangunan

Tingkat kepadatan bangunan pada permukiman kumuh Kelurahan Sri Meranti masih terbilang relatif sedang. Berikut gambar 5.2 kondisi tingkat kepadatan bangunan



Gambar 5.2 Tingkat Kepadatan Bangunan

Sumber: Hasil Survei Primer 2021

c) Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan pada permukiman apabila tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan terdiri atas standar kesehatan bangunan dan standar kenyamanan bangunan.

Berdasarkan hasil observasi ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan belum sesuai di tinjau dari standar kesehatan bangunan yaitu dari segi pencahayaan rumah belum memiliki standar yang benar yaitu belum meratanya jenis pencahayaan di permukiman lokasi studi sehingga tidak terdapatnya ruang yang menghasilkan cahaya alami saat pagi hingga sore hari. Kemudian standar teknis kesehatan yaitu sanitasi yang sesuai dalam SNI terdiri atas sistem pengolahan limbah, drainase dan persampahan permukiman, dilokasi penelitian sanitasinya belum terkelola dengan baik karena air limbah yang belum memiliki septitank, serta ketidakterseediaan drainase, dan tidak terdapatnya pengolahan sampah

Dengan pemilahan domestik skala rumah tangga. Sedangkan standar teknis kenyamanan bangunan yaitu tidak terdapatnya ruang gerak antar ruang dikarenakan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, yang menyebabkan kebisingan, ketidaknyamanan udara dan temperatur ruang, serta ketidaknyamanan hak pribadi terganggu di lokasi studi. Oleh karena itu bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan diatas ialah sebanyak 56 unit bangunan. Berikut gambar 5.3 kondisi bangunan tidak sesuai persyaratan teknis.



Gambar 5.3
Kondisi Bangunan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sumber: Hasil Survei Primer 2021

5.1.1.3 Jalan Lingkungan

a) Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

Cakupan pelayanan jalan lingkungan dapat dilihat dari dua indikator yaitu perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah dan perlunya keterhubungan antar jalan dalam perumahan dalam skala kawasan. Berdasarkan hasil survei lapangan bahwasannya jalan lingkungan yang ada di lingkungan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sri Meranti terdapatnya permukiman yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan sepanjang 130 M. Berikut gambar 5.5 kondisi cakupan pelayanan jalan lingkungan.



Gambar 5.4
Kondisi Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
Sumber: Hasil Survei Primer 2021

b) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan

Kualitas permukaan jalan lingkungan merupakan kondisi jenis perkerasan jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Sri Meranti. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya kualitas jalan lingkungan di Kelurahan Sri Meranti berupa semenisasi akan tetapi masih terdapatnya jalan lingkungan dengan kondisi permukaan jalan tanah yang tidak diperkeras. Dan permukaan jalan lingkungan dengan jenis perkerasan semenisasi dan tanah yang mengalami kerusakan dengan panjang jalan yaitu sepanjang 1.185 meter. Berikut gambar 5.6 kondisi kualitas jalan lingkungan.



Gambar 5.5
Kondisi Kualitas Jalan Lingkungan

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

Berikut Tabel 5.1 Kondisi eksisting ruas jalan lingkungan pada permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti

Tabel 5.1 Kondisi eksisting ruas jalan lingkungan

Jaringan Jalan Lingkungan		Ruas Jalan	Kondisi Eksisting Jaringan Jalan
RW	RT		
2	4	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Semenisasi • Panjang Jalan : 200 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan semenisasi • Panjang Jalan : 200 M • Lebar Jalan : 1,5 M
	5	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Semenisasi • Panjang Jalan : 650 M • Lebar Jalan : 2,5 M
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Semenisasi • Panjang Jalan : 283 M • Lebar Jalan : 1,5 M
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Tanah • Becek Jika Hujan • Panjang Jalan : 367 M • Lebar Jalan : 1,5 M •

3	4	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 278 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 246 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 137 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 155 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 110 M • Lebar Jalan : 1,5 M
		Ruas Jalan 6	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 104 M • Lebar Jalan : 1,5 M
	5	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 210 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 221 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 45 M • Lebar Jalan : 1,5 M
		Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 521 M • Lebar Jalan : 2 M
7	Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 590 M • Lebar Jalan : 2 M 	
	Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 49 M • Lebar Jalan : 2 M 	
	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 98 M • Lebar Jalan : 2 M 	
4	3	Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 62 M • Lebar Jalan : 2 M

		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 65 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 75 M • Lebar Jalan : 2 M
5	1	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 157 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 103 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 155 M • Lebar Jalan : 2 M
		Ruas Jalan 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 25 M • Lebar Jalan : 1,5 M

Sumber : Hasil Analisis, 2021

5.1.1.4 Penyediaan Air Minum

a) Ketidakterersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman air minum ialah apabila tercapainya akses jaringan distribusi air minum kepada masyarakat dengan standar air minum sesuai syarat kesehatan air minum yang terdiri atas persyaratan fisik, persyaratan mikrobiologis, dan persyaratan kimiawi.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi studi bahwasannya belum maksimalnya ketersediaan akses aman air minum kerana belum seluruhnya masyarakat yang mendapatkan akses aman air minum kerana belum sesuai standar kesehatan karena kualitas air berbau, berwarna, dan keruh dengan jumlah 110 KK.

Sedangkan mayoritas masyarakat sudah mendapatkan akses aman air minum.

Berikut gambar 5.8 sumber air minum.



Gambar 5.6 Sumber Air Minum

Sumber: Hasil Survei Primer 2021

b) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum apabila tidak tercapainya kebutuhan air minum dengan kebutuhan minimal yaitu 60 liter/orang/hari. Adapun kebutuhan air minum dapat dipenuhi melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) dan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP).

Secara umum masyarakat pada kawasan penelitian menggunakan sumur bor sebagai sumber air bersihnya untuk keperluan mandi dan mencuci. Sedangkan untuk air minum, sebagian masyarakat membeli air galon dan sebagian memasak air dari sumber sumur bor. Saat ini pada kawasan perencanaan terdapat 1 sumber air bersih komunal yang dapat digunakan bersama walaupun belum bisa memaksimalkan kebutuhan air minum di lokasi penelitian.

Berdasarkan data sekunder dan primer bahwasannya hasil kebutuhan air minum setiap individu masyarakat permukiman kumuh di lokasi penelitian mayoritas penduduk sudah terpenuhi dan yang tidak mencapai minimal 60 liter/orang/hari dengan jumlah KK yang tidak terpenuhinya kebutuhan air minum yaitu sebanyak 29 KK.

5.1.1.5 Drainase Lingkungan

a) Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air

Drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan akan menimbulkan genangan. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya saluran drainase di kawasan Kelurahan Sri Meranti banyak yang belum terpelihara, sedangkan saluran drainase yang ada tidak sepenuhnya mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan kondisinya ada yang tersumbat yang disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah, aliran air di drainase tidak mengalir, dan sedimentasi saluran, sehingga luas kawasan yang terkena genangan ialah sebesar 0,93 Ha. Berikut Gambar 5.10 drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air.



Gambar 5.7 Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air
Sumber: Hasil Survei Primer 2021

b) Ketidaktersediaan Drainase

Berdasarkan hasil observasi di kawasan permukiman kumuh di lingkungan Kelurahan Sri Meranti terdapat banyak lingkungan permukiman yang tidak terbangunnya saluran drainase dikarenakan jarak antar bangunan rapat dan membantasi ruang untuk drainase, sehingga jumlah drainase yang tidak terbangun sepanjang 1.570 meter. Berikut Gambar 5.11 ketidaktersediaan drainase :



Gambar 5.8 Ketidaktersediaan Drainase
Sumber: Hasil Survei Primer 2021

c) Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan

Ketidakterhubungan sistem drainase apabila saluran drainase lokal tidak terhubung dengan hirarki saluran drainasenya. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti dengan kondisi eksisting drainase terdapat banyak jaringan jalan yang tidak memiliki saluran drainase, sehingga menyebabkan menimbulkan genangan di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti.

d) Tidak Terpeliharanya Drainase

Pemeliharaan saluran drainase perkotaan mencakup bentuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan tujuan menjaga fungsi sistem saluran drainase yang ada. Untuk itu diperlukan pemeliharaan sistem drainase diperkotaan yang dapat dikategorikan menjadi pemeliharaan rutin, berkala, khusus, dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian saluran drainase yang sudah terbangun saat ini masih terdapat saluran drainase yang tidak terawat dan banyaknya tumpukan sampah yang berdampak aliran air di drainase tidak mengalir, dikarenakan tidak terdapatnya program pemeliharaan saluran drainase baik itu pemeliharaan rutin, berkala, khusus dan rehabilitasi, sehingga dengan kondisi drainase yang ada saat ini, maka drainase yang tidak terpelihara ialah sepanjang 1.585 meter. Adapun selisih persentase drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisiting ialah 43%.

e) Kualitas Kontruksi Drainase

Secara umum semua jaringan jalan lingkungan pada kawasan perencanaan memiliki drainase yang tidak terawat rusak dan kotor. Beberapa drainase yang ada biasanya memiliki dimensi yang kecil dan tidak dapat lagi berfungsi sebagai drainase karena rusak maupun tertutup oleh sampah. Panjang drainase yang mengalami kerusakan adalah 1.485 meter. Berikut merupakan gambaran permasalahan terkait drainase lingkungan pada kawasan perencanaan. Berikut dapat dilihat pada Tabel 5.2 Kondisi eksisting drainase lingkungan :

Tabel 5.2 Kondisi Eksisting drainase lingkungan

Jaringan Drainase Lingkungan		Ruas Jalan	Kondisi Eksisting Jaringan Drainase
RW	RT		
2	4	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 400 M
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 400 M
	5	Ruas Jalan 1	Tidak terdapat drainase pada kanan dan kiri ruas jalan
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 566 M
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 734 M
3	4	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 556 M
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 492M
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 274 M
		Ruas Jalan 4	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 310 M
		Ruas Jalan 5	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 220 M
		Ruas Jalan 6	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan

			sepanjang 208 M
		Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 420 M
	5	Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 442 M
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 90 M
		Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 1042 M
	7	Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 1180 M
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 98 M
4	3	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 196 M
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 124 M
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 130 M
		Ruas Jalan 4	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 150 M

5	1	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 314 M
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 206 M
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 310 M
		Ruas Jalan 4	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 50 M

Sumber : Hasil analisis, 2021



Gambar 5.9 Kualitas Kontruksi Drainase

Sumber: Hasil Survei Primer 2021

5.1.1.6 Pengelolaan Air Limbah

a) Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis apabila kondisi pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman

tidak memiliki sistem air limbah yang memadai, ditinjau dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septi tank baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Berdasarkan hasil survei lapangan di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti dimana mayoritas rumah sudah menggunakan kakus/kloset yang terhubung dengan septik tank.

b) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis apabila kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septitank, dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Berdasarkan hasil survei lapangan di lokasi studi bahwasannya kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sudah sesuai standar teknis yang sudah memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septitank.

5.1.1.7 Pengelolaan Persampahan

a) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis apabila tidak terpenuhinya prasarana dan sarana sampah yang terdiri atas tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga,

tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwasannya di lokasi studi kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis karena tidak ditemukan tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, hanya terdapat 1 TPS yang tersedia di lingkungan lokasi studi, tidak ditemukan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), hanya ada truk sampah pada skala lingkungan, dan tidak adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di lokasi studi. Adapun total KK dengan sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu tidak adanya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga sebanyak 298 KK. Berikut gambar 5.17 kondisi tidak tersedianya tempat sampah



Gambar 5.10
Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah

Sumber: Hasil Survei Primer 2021

b) Sistem Pengolahan Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis ditinjau dari sistem pengolahan sampah saling terintegrasi dengan standar yaitu terdapatnya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan sistem pengolahan sampah di kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti ini tidak sesuai persyaratan teknis, karena :

- Tidak terdapatnya pewadahan dan pemilahan domestik bagi permukiman sehingga membuang sampah langsung ke sungai dan lahan kosong yang membuat kawasan lingkungan permukiman terlihat kumuh, sedangkan permukiman yang jauh dari tepi sungai sudah ada pewadahan tetapi belum ada pemilahan domestik.
- Jenis pengumpulan sampah dalam skala lingkungan hanya terdapat 1 TPS di lokasi studi dan TPS tersebut belum mampu menampung kapasitas sampah yang ada, maka timbul TPS ilegal disekitar lokasi dengan didukung kebiasaan masyarakat mengumpulkan sampah pada tiap-tiap gang, dan tidak ditemukannya TPS 3R yaitu reduce, reuse, recycle.
- Jenis pengangkutan sampah yaitu hanya terdapat truk sampah yang hanya melayani pengangkutan sampah yang berada di jalan kolektor, dan tidak adanya gerobak sampah yang melayani pengangkutan sampah di jalan lingkungan pada tiap rumah tangga.
- Tidak ditemukan pengolahan sampah lingkungan berdasarkan reduce,

reuse, recycle.

Oleh karena itu jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis ialah sebanyak 164 KK. Berikut gambar 5.18 kondisi pengelolaan sampah yang tidak sesuai.



Gambar 5.11
Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Tidak Sesuai

Sumber: Hasil Survei Primer 2021

c) Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengolahan Persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan secara berkala. Berdasarkan hasil data sekunder dan primer bahwasannya di lokasi penelitian memiliki jumlah KK yang tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolan sampahnya sebanyak 248 KK karena tidak adanya bentuk pemeliharaan pengolahan persampahan baik secara rutin maupun berkala.

5.1.1.8 Proteksi Kebakaran

a. Tidak Tersedianya Prasarana Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi lapangan mayoritas tidak ditemukan prasarana proteksi kebakaran seperti bangunan pos kebakaran, pasokan air yang lebih, jalan lingkungan yang tidak bisa dilalui mobil kebakaran, dan tidak adanya data sistem proteksi kebakaran lingkungan.

b. Tidak Tersedianya Sarana Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi lapangan tidak ditemukan sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR), mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya, sehingga dapat di simpulkan bahwasannya kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti ini tidak ada sarana kebakaran.



5.1.2 Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti

Dalam menganalisis tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti dilakukan terlebih dahulu penilaian lokasi perblok atau lokasi RT/RW pada lokasi studi yang terindikasikan menjadi permukiman kumuh, karena dalam satu Kelurahan Sri Meranti tidak semua menjadi permukiman kumuh. Pemilihan tersebut dapat dilihat dari karakteristik indikator permukiman kumuh dan berdasarkan SK Walikota Kota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh dan hasil observasi lapangan.

Adapun hasil observasi lapangan yang mempertimbangkan karakteristik berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu kondisi fisik bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau. Maka dapat di ketahui blok RT/RW lokasi permukiman kumuh pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti

No	RW	RT	Luas (ha)
1	02	04	1,6
		05	2,3
2	03	04	0,7
		05	0,7
		07	0,8
3	04	03	0,7
4	05	01	0,8

Sumber : Hasil Analisis 2021

Tabel diatas merupakan lokasi kajian yang diindikasikan sebagai permukiman kumuh, sehingga akan dianalisis untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kumuh dengan hasil tingkat kekumuhan rendah, sedang dan tinggi. Maka akan dianalisis berdasarkan data identifikasi tiap-tiap RT/RW lokasi yang terindikasi permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti. Dengan dihitungnya tiap-tiap RT/RW maka hasil tingkat kekumuhan yang ada di Kelurahan Sri Meranti lebih akurat dan hasil yang lebih maksimal. Maka dari itu tiap-tiap indikator kekumuhan mulai dari kondisi bangunan, jaringan jalan lingkungan, drainase lingkungan, air bersih, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran dan ketersediaan RTH masing-masing memiliki nilai skor yang akan mempengaruhi total dari nilai tingkat kekumuhan, apakah dia termasuk kumuh ringan, kumuh sedang, kumuh berat ataupun tidak kumuh. Dengan didapatnya hasil masing-masing RT, maka seluruhnya di akumulasikan sehingga didapatkan hasil tingkat kekumuhan untuk skala kelurahan. Berikut dapat dilihat tabel tentang tingkat kekumuhan :

Tabel 5.4 Tingkat Kekumuhan RT 004 / RW 002

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH		RT004 RW002			
Provinsi	: RIAU	Luas SK	1,63	Ha	
Kab/Kota	: KOTA PEKAN BARU	Luas Verifikasi	1,63	Ha	
Kecamatan	: RUMBAI	Jumlah Bangunan	43	Unit	
Kawasan	: SRI MERANTI	Jumlah Penduduk	90	Jiwa	
		Jumlah KK	45,00	KK	
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	16,00	Unit	37,21%	1
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	5,00	Unit	11,63%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				12,40%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00	Meter	-100,00%	0

	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	21,00	KK	46,67%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0,00	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				23,33%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	150,00	Meter	33,33%	1
	c. Ketidaktersediaan dan Sistem Drainase Kota	75,00	Meter	16,67%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	300,00	Meter	66,67%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	100,00	Meter	22,22%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	45,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	15,00	KK	33,33%	1
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	45,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				77,78%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	45,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	45,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
TOTAL NILAI					27
TINGKAT KEKUMUHAN					KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL					33,36%

Sumber : Hasil Analisis 2021



RT 004 / RW 002 merupakan salah satu RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk luas RT 004 / RW 002 yang tertera pada SK adalah 1,63 ha. Dan setelah dilakukannya perhitungan lapangan baik menggunakan peta citra dan lainnya maka luas RT 004 / RW 002 yakni 1,63 ha. Yang mana sesuai dengan luas yang tertera pada SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk jumlah bangunan yang berada pada kawasan ini yakni berjumlah 43 unit bangunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 90 orang dan KK yang terdaftar sebanyak 45 KK. Dalam analisis yang dilakukan pada kawasan RT 004 / RW 002 didapat jumlah skor keseluruhan dengan nilai 27. Maka kawasan RT 004 / RW 002 termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 33,36 %.



Tabel 5.5 Tingkat Kekumuhan RT 005 / RW 002

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH		RT005 RW002			
Provinsi	: RIAU	Luas SK	2,30	Ha	
Kab/Kota	: KOTA PEKAN BARU	Luas Verifikasi	2,30	Ha	
Kecamatan	: RUMBAI	Jumlah Bangunan	41	Unit	
Kawasan	: SRIMERANTI	Jumlah Penduduk	168	Jiwa	
		Jumlah KK	42,00	KK	
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	9,00	Unit	21,95%	0
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	9,00	Unit	21,95%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	150,00	Meter	10,34%	0

	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	16,00	KK	38,10%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0,00	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				19,05%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,04	Ha	1,74%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	600,00	Meter	48,98%	1
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	625,00	Meter	51,02%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	225,00	Meter	18,37%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	42,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	17,00	KK	40,48%	1
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	42,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				80,16%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	42,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	42,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
TOTAL NILAI					26
TINGKAT KEKUMUHAN					KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL					31,32%

Sumber : Hasil Analisis 2021

RT 005 / RW 002 merupakan salah satu RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk luas RT 005 / RW 002 yang tertera pada SK adalah 2,3 ha. Dan setelah dilakukannya perhitungan lapangan baik menggunakan peta citra dan lainnya maka luas RT 005 / RW 002 yakni 2,63 ha. Yang mana sesuai dengan luas yang tertera pada SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk jumlah bangunan yang berada pada kawasan ini yakni berjumlah 41 unit bangunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 168 orang dan KK yang terdaftar sebanyak 42 KK. Dalam analisis yang dilakukan pada kawasan RT 005 / RW 002 didapat jumlah skor keseluruhan dengan nilai 26. Maka kawasan RT 005 / RW 002 termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 31,32 %.



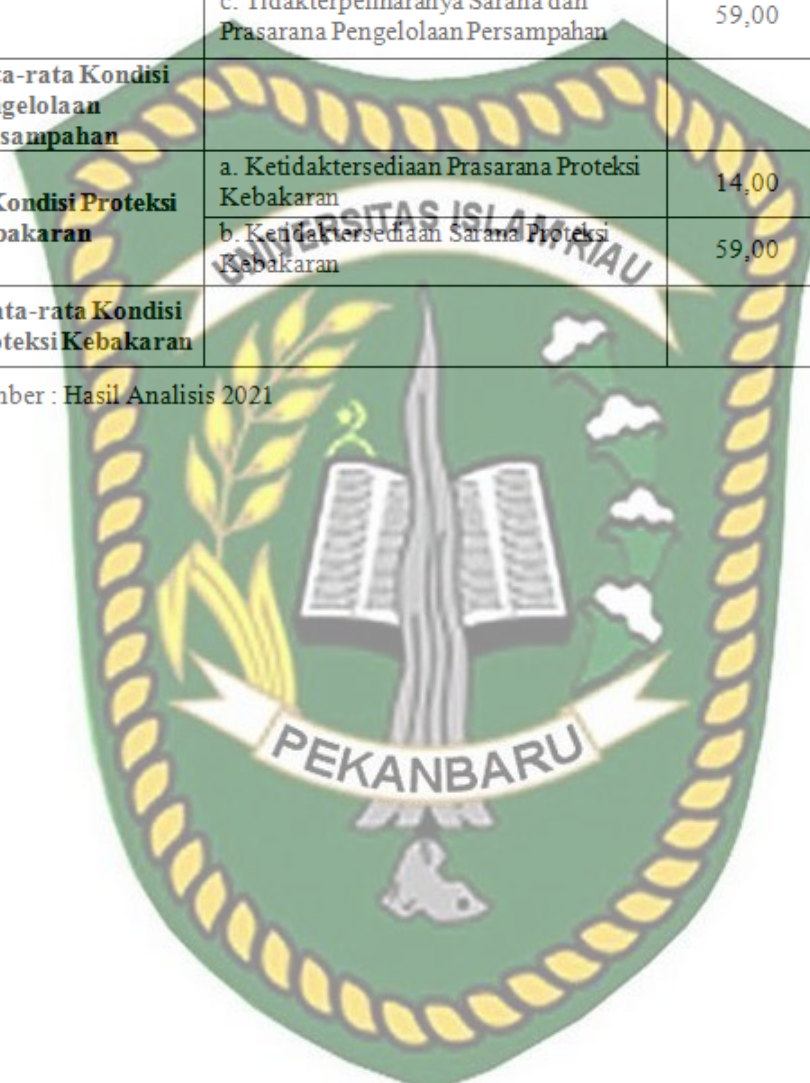
Tabel 5.6 Tingkat Kekumuhan RT 004 / RW 003

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH		RT004 RW003			
Provinsi	: RIAU	Luas SK		0,77	Ha
Kab/Kota	: KOTA PEKAN BARU	Luas Verifikasi		0,77	Ha
Kecamatan	: RUMBAI	Jumlah Bangunan		59	Unit
Kawasan	: SRIMERANTI	Jumlah Penduduk		220	Jiwa
		Jumlah KK		61,00	KK
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	11,00	Unit	18,64%	0
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	6,00	Unit	10,17%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0

	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	21,00	KK	34,43%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	4,00	KK	6,56%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				17,21%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00	Ha	0,00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	100,00	Meter	100,00%	5
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	59,00	KK	96,72%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	59,00	KK	96,72%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	59,00	KK	96,72%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				96,72%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	14,00	Unit	24,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	59,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%	
TOTAL NILAI					26
TINGKAT KEKUMUHAN					KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL					26,28%

Sumber : Hasil Analisis 2021



RT 004 / RW 003 merupakan salah satu RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk luas RT 004 / RW 003 yang tertera pada SK adalah 0,7 ha. Dan setelah dilakukannya perhitungan lapangan baik menggunakan peta citra dan lainnya maka luas RT 004 / RW 003 yakni 0,7 ha. Yang mana sesuai dengan luas yang tertera pada SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk jumlah bangunan yang berada pada kawasan ini yakni berjumlah 59 unit bangunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 220 orang dan KK yang terdaftar sebanyak 61 KK. Dalam analisis yang dilakukan pada kawasan RT 004 / RW 003 didapat jumlah skor keseluruhan dengan nilai 26. Maka kawasan RT 004 / RW 003 termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 26,28 %.



Tabel 5.7 Tingkat Kekumuhan RT 005 / RW 003

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH		RT005 RW003			
Provinsi	: RIAU	Luas SK		0,75	Ha
Kab/Kota	: KOTA PEKAN BARU	Luas Verifikasi		0,75	Ha
Kecamatan	: RUMBAI	Jumlah Bangunan		46	Unit
Kawasan	: SRI MERANTI	Jumlah Penduduk		185	Jiwa
		Jumlah KK		50,00	KK
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	5,00	Unit	10,87%	0
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	7,00	Unit	15,22%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0

	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	9,00	KK	18,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0,00	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00	Ha	0,00%	0
	b. Ketidakterseediaan Drainase	90,00	Meter	100,00%	5
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	50,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	14,00	KK	28,00%	1
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	0,00	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				42,67%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	46,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	46,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
TOTAL NILAI					21
TINGKAT KEKUMUHAN					KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL					23,24%

Sumber : Hasil Analisis 2021

RT 005 / RW 003 merupakan salah satu RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk luas RT 005 / RW 003 yang tertera pada SK adalah 0,7 ha. Dan setelah dilakukannya perhitungan lapangan baik menggunakan peta citra dan lainnya maka luas RT 005 / RW 003 yakni 0,7 ha. Yang mana sesuai dengan luas yang tertera pada SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk jumlah bangunan yang berada pada kawasan ini yakni berjumlah 46 unit bangunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 185 orang dan KK yang terdaftar sebanyak 50 KK. Dalam analisis yang dilakukan pada kawasan RT 005 / RW 003 didapat jumlah skor keseluruhan dengan nilai 21. Maka kawasan RT 005 / RW 003 termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 23,24 %.



Tabel 5.8 Tingkat Kekumuhan RT 007 / RW 003

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH		RT007 RW003			
Provinsi	: RIAU	Luas SK		0,86	Ha
Kab/Kota	: KOTA PEKAN BARU	Luas Verifikasi		0,86	Ha
Kecamatan	: RUMBAI	Jumlah Bangunan		51	Unit
Kawasan	: SRI MERANTI	Jumlah Penduduk		199	Jiwa
		Jumlah KK		52,00	KK
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	6,00	Unit	11,76%	0
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	8,00	Unit	15,69%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	50,00	Meter	4,13%	0

	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				47,93%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	13,00	KK	25,00%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	3,00	KK	5,77%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				12,50%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00	Ha	0,00%	0
	b. Ketidakterseediaan Drainase	90,00	Meter	7,20%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	660,00	Meter	52,80%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.160,00	Meter	92,80%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,12%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	17,00	KK	32,69%	1
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	0,00	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				10,90%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	51,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	51,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
TOTAL NILAI					20
TINGKAT KEKUMUHAN					KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL					28,64%

Sumber : Hasil Analisis 2021



RT 007 / RW 003 merupakan salah satu RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk luas RT 007 / RW 003 yang tertera pada SK adalah 0,8 ha. Dan setelah dilakukannya perhitungan lapangan baik menggunakan peta citra dan lainnya maka luas RT 007 / RW 003 yakni 0,8 ha. Yang mana sesuai dengan luas yang tertera pada SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk jumlah bangunan yang berada pada kawasan ini yakni berjumlah 51 unit bangunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 199 orang dan KK yang terdaftar sebanyak 52 KK. Dalam analisis yang dilakukan pada kawasan RT 007 / RW 003 didapat jumlah skor keseluruhan dengan nilai 25. Maka kawasan RT 007 / RW 003 termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 28,64 %.



Tabel 5.9 Tingkat Kekumuhan RT 003 / RW 004

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH		RT003 RW004			
Provinsi	: RIAU	Luas SK		0,76	Ha
Kab/Kota	: KOTA PEKAN BARU	Luas Verifikasi		0,76	Ha
Kecamatan	: RUMBAI	Jumlah Bangunan		63	Unit
Kawasan	: SRIMERANTI	Jumlah Penduduk		244	Jiwa
		Jumlah KK		63,00	KK
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	9,00	Unit	14,29%	0
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	12,00	Unit	19,05%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	200,00	Meter	40,00%	1

	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	25,00	Meter	5,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				20,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	18,00	KK	28,57%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	22,00	KK	34,92%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31,75%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00	Ha	0,00%	0
	b. Ketidakterseediaan Drainase	125,00	Meter	100,00%	5
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	63,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	20,00	KK	31,75%	1
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	63,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				77,25%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	63,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	63,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
TOTAL NILAI					29
TINGKAT KECUMUHAN					KUMUH RINGAN
RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL					35,57%

Sumber : Hasil Analisis 2021



RT 003 / RW 004 merupakan salah satu RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk luas RT 003 / RW 004 yang tertera pada SK adalah 0,7 ha. Dan setelah dilakukannya perhitungan lapangan baik menggunakan peta citra dan lainnya maka luas RT 003 / RW 004 yakni 0,7 ha. Yang mana sesuai dengan luas yang tertera pada SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk jumlah bangunan yang berada pada kawasan ini yakni berjumlah 63 unit bangunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 244 orang dan KK yang terdaftar sebanyak 63 KK. Dalam analisis yang dilakukan pada kawasan RT 007 / RW 003 didapat jumlah skor keseluruhan dengan nilai 29. Maka kawasan RT 007 / RW 003 termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 35,57 %.



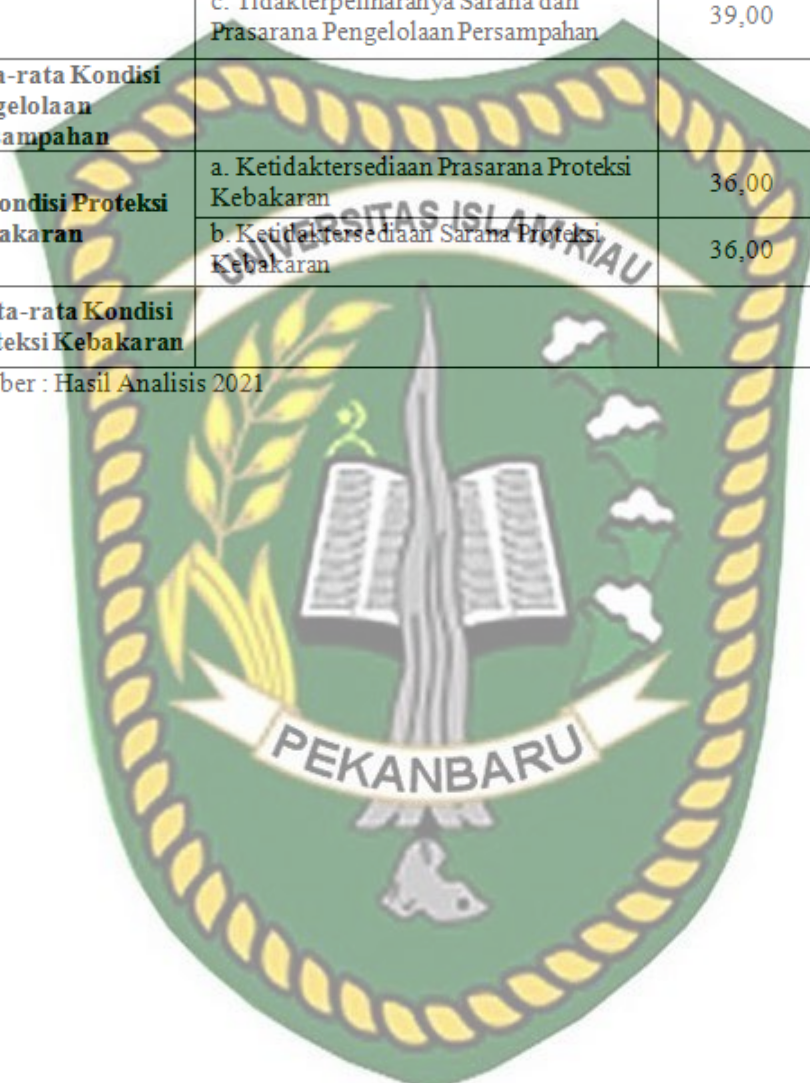
Tabel 5.10 Tingkat Kekumuhan RT 001 / RW 005

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH		RT001 RW005			
Provinsi	: RIAU	Luas SK	0,89	Ha	
Kab/Kota	: KOTA PEKAN BARU	Luas Verifikasi	0,89	Ha	
Kecamatan	: RUMBAI	Jumlah Bangunan	36	Unit	
Kawasan	: SRI MERANTI	Jumlah Penduduk	149	Jiwa	
		Jumlah KK	39,00	KK	
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	9,00	Unit	25,00%	1
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	9,00	Unit	25,00%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				16,67%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0

	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	12,00	KK	30,77%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0,00	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				15,38%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,89	Ha	100,00%	5
	b. Ketidaktersedia Drainase	415,00	Meter	100,00%	5
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	0,00	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				40,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0

Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	39,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	22,00	KK	56,41%	3
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	39,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				85,47%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	36,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	36,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
TOTAL NILAI					36
TINGKAT KEKUMUHAN					KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL					36,79%

Sumber : Hasil Analisis 2021



RT 001 / RW 005 merupakan salah satu RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti berdasarkan SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk luas RT 001 / RW 005 yang tertera pada SK adalah 0,8 ha. Dan setelah dilakukannya perhitungan lapangan baik menggunakan peta citra dan lainnya maka luas RT 001 / RW 005 yakni 0,8 ha. Yang mana sesuai dengan luas yang tertera pada SK permukiman kumuh No 878 th 2017 Pekanbaru. Untuk jumlah bangunan yang berada pada kawasan ini yakni berjumlah 36 unit bangunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 149 orang dan KK yang terdaftar sebanyak 39 KK. Dalam analisis yang dilakukan pada kawasan RT 001 / RW 005 didapat jumlah skor keseluruhan dengan nilai 36. Maka kawasan RT 001 / RW 005 termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 36,79 %.

Berikut dapat dilihat pada Tabel 5.9 rekapitulasi tingkat kekumuhan keseluruhan RW/RT di Kelurahan Sri Meranti :



Tabel 5.11 Rekapitulasi Tingkat Kekumuhan

No	RW	RT	Tingkat Kekumuhan	Skor kumuh
1	2	4	Kumuh Ringan	27
		5	Kumuh Ringan	26
2	3	4	Kumuh Ringan	26
		5	Kumuh Ringan	21
		7	Kumuh Ringan	20
3	4	3	Kumuh Ringan	29
4	5	1	Kumuh Ringan	36

Sumber : Analisis 2021

Pada hasil perhitungan tingkat kekumuhan yang sudah di dapatkan maka seluruh kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Sri Meranti termasuk kategori kumuh ringan, dengan skor yang bervariasi, untuk skor tertinggi yaitu RT 01 / RW 05 dengan skor kekumuhan adalah 36, dan skor tingkat kekumuhan terendah ada di RT 05 / RW 03 dengan nilai skor 21. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa masing-masing RT permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti masih tergolong dalam kategori kumuh ringan, tidak ada yang termasuk didalam kategori kumuh sedang maupun berat. Namun hal ini tentu menjadi pr bersama mengingat bahwa Kelurahan Sri Meranti sudah lama menjadi pusat perhatian pemerintah dalam upaya penanggulangan kawasan permukiman kumuh dilihat dari adanya beberapa program-program yang sudah berjalan. Namun dengan adanya program-program tersebut nyatanya permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti belum teratasi secara maksimal. Setelah mendapatkan hasil perhitungan kumuh tingkat RW/RT maka selanjutnya adalah perhitungan tingkat kekumuhan akhir skala Kelurahan Sri Meranti dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut :

Tabel 5.12 Tingkat Perhitungan Akhir

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	65,00	Unit	19,17%	0
	b. Kepadatan Bangunan	0,00	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	56,00	Unit	16,52%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	130,00	Meter	2,76%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.185,00	Meter	25,14%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				12,57%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	110,00	KK	31,25%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	29,00	KK	8,24%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				15,63%	

4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,93	Ha	11,68%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	1.570,00	Meter	42,95%	1
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	75,00	Meter	2,05%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	1.585,00	Meter	43,37%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.485,00	Meter	40,63%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				25,39%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0,00	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0,00	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	298,00	KK	84,66%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	164,00	KK	46,59%	1
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	248,00	KK	70,45%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				67,23%	

7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	197,00	Unit	58,11%	3
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	339,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				79,06%	

Sumber : Hasil Analisis 2021

TOTAL NILAI	22
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	28,55%



Tabel 5.13 Tingkat Perhitungan Kawasan

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
I. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	65,00	Unit	19,17%	0
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3				
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1				
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	0,00	Ha	0,00%	0
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3				
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1				
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	56,00	Unit	16,52%	0
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3				
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1				

2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	130,00	Meter	2,76%	0
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3				
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1				
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	1.185,00	Meter	25,14%	1
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3				
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1				
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	110,00	KK	31,25%	1
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3				
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1				
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	29,00	KK	8,24%	0	
	51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3					
	25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1					

4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	5	0,93	Ha	11,68%	0
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	3				
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1				
	b. Ketidakterersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	1.570,00	Meter	42,95%	1
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3				
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1				
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	75,00	Meter	2,05%	0
		51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3				
		25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1				
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	1.585,00	Meter	43,37%	1
		51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3				
		25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1				

	e. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	1.485,00	Meter	40,63%	1
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3				
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1				
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	0,00	KK	0,00%	0
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1				
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	0,00	KK	0,00%	0
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan	5	298,00	KK	84,66%	5

	persyaratan Teknis	teknis					
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1				
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	164,00	KK	46,59%	1
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3				
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1				
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	248,00	KK	70,45%	3
		51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1				
7. Kondisi Proteksi	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	197,00	Unit	58,11%	3

Kebakaran	Kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	339,00	Unit	100,00%	5
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1				
	b. Ketidakterersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5				
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN				TOTAL NILAI		22	
	71 -95	KUMUH BERAT			TINGKAT KECUMUHAN	KUMUH RINGAN	
	45 – 70	KUMUH SEDANG					
	19 – 44	KUMUH RINGAN					

Sumber : Hasil Analisis 2021



Setelah hasil perhitungan tingkat kekumuhan masing-masing RT didapatkan maka selanjutnya adalah perhitungan tingkat kekumuhan akhir yang mana seluruh tingkat kekumuhan masing-masing RT di akumulasikan sehingga skor nilai tingkat kekumuhan akhir adalah 22. Termasuk dalam tingkat kekumuhan ringan. Karena pada dasarnya sudah ada beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Sri Meranti sudah ada yang berjalan namun masih jauh dari harapan kita bersama. Karena program yang ditujukan untuk penanggulangan kawasan permukiman kumuh masih belum maksimal.

Dapat dilihat pada Tabel 5.10 bahwa masing-masing indikator kekumuhan memiliki nilai poin yang berbeda-beda. Untuk kondisi bangunan memiliki nilai skor 0, untuk kondisi jaringan jalan lingkungan memiliki nilai skor 1, untuk kondisi drainase lingkungan memiliki nilai skor 3, untuk kondisi air minum memiliki nilai skor 1, untuk kondisi limbah memiliki nilai skor 0, untuk kondisi persampahan memiliki nilai skor 9 dan sistem proteksi kebakaran memiliki nilai skor 8. Maka didapat hasil akhir dari perhitungan tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti adalah 22 dan rata-rata kekumuhan sektoral adalah 28,55%.

Untuk menilai faktor-faktor yg dominan mempengaruhi tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut :

Tabel 5.14 Nilai faktor-faktor yg dominan mempengaruhi tingkat kekumuhan

No	Indikator Kekumuhan	Nilai skor
1	Sistem persampahan	9 (sembilan)
2	Sistem proteksi kebakaran	8 (delapan)
3	Jaringan drainase lingkungan	3 (tiga)
4	Jaringan jalan lingkungan	1 (satu)
5	Air minum	1 (satu)
6	Sistem pembuangan limbah	0 (nol)
7	Kondisi bangunan	0 (nol)

Sumber : Hasil analisis, 2021



5.2 Merumuskan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti

5.2.1 Tahap Koordinasi dan Penyerapan Aspirasi

Tahap koordinasi dan penyerapan aspirasi merupakan tahap awal dalam proses identifikasi kawasan perencanaan. Dalam tahap ini dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, yaitu pihak kelurahan, serta pihak RT maupun RW yang berada pada kawasan kumuh Sri Meranti. Dengan di lakukannya koordinasi serta penyerapan aspirasi kepada pihak-pihak terkait yang berada pada kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian penelitian dan juga memberikan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

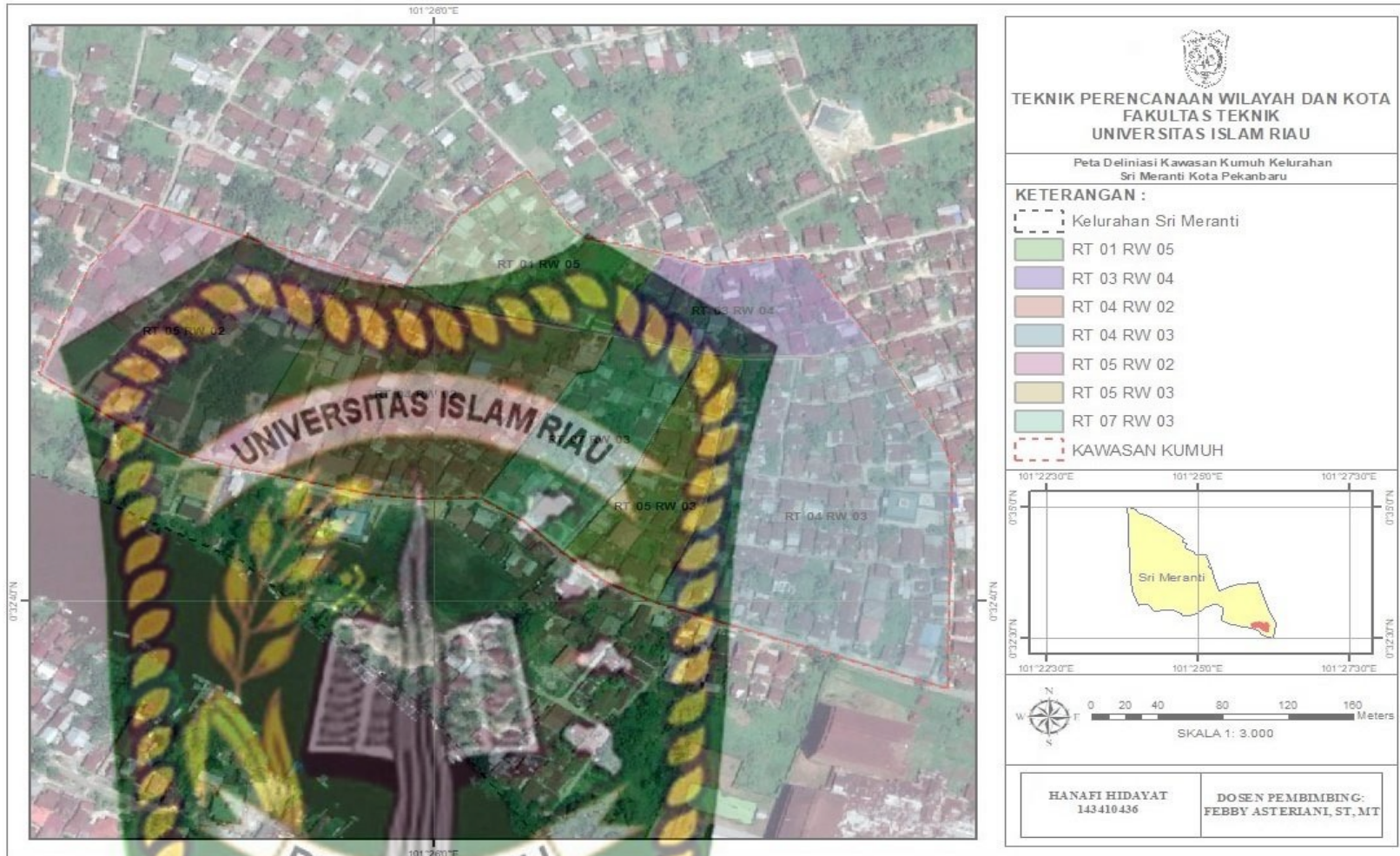


Gambar 5.12 Koordinasi dan penyerapan aspirasi

5.2.2 Deliniasi Kawasan Perencanaan

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor : 878 Tahun 2017 tentang penetapan lokasi kumuh dan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti, kawasan perencanaan merupakan RW 002,003,004,005 yang terdapat di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai. Luas kawasan permukiman kumuh yang terdapat di kelurahan Sri Meranti adalah sebesar 7,96 hektar. Berikut Gambar 5. merupakan peta batas deliniasi terhadap kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti :





Gambar : 5.13 Peta Deliniasi Permukiman Kumuh Kelurahan Sri Meranti

5.2.3 Analisis Serta Rencana Arahana Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Kumuh Kelurahan Sri Meranti

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kawasan kumuh meliputi rencana terhadap peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan, drainase lingkungan, persampahan, air bersih, sanitasi, proteksi kebakaran, serta RTH.

5.2.3.1 Analisis Serta Rencana Arahana Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan tergantung dengan kondisi existing jaringan jalan. Pada jaringan jalan tanah maka dilakukan dengan peningkatan kualitas jalan dengan perkerasan/pegecoran (semenisasi). Dan pada jaringan jalan perkerasan rusak dapat dilakukan dengan perbaikan jalan berupa pelapisan perkerasan jalan. Pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti lebar maksimal penanganan jalan lingkungan adalah 2,5 meter dan lebar minimal 1,5 meter

Pengembangan system jaringan jalan lingkungan

- Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- Jalan lingkungan menghubungkan antar persil dalam kawasan permukiman.
- Jalan lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6

meter.

Berikut merupakan tabel rencana peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan pada Kelurahan Sri Meranti berdasarkan tiap masing-masing RT :



Tabel 5.15 Rencana Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Lingkungan

Jaringan Jalan Lingkungan		Ruas Jalan	Kondisi Eksisting Jaringan Jalan	Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
RW	RT			
2	4	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Semenisasi • Panjang Jalan : 200 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan semenisasi • Panjang Jalan : 200 M • Lebar Jalan : 1,5 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
	5	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Semenisasi • Panjang Jalan : 650 M • Lebar Jalan : 2,5 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Semenisasi • Panjang Jalan : 283 M • Lebar Jalan : 1,5 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Tanah • Becek Jika Hujan • Panjang Jalan : 367 M • Lebar Jalan : 1,5 M 	Peningkatan Kualitas Jalan Tanah Berupa Perkerasan/Pengecoran (Semenisasi)
3	4	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 278 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 246 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 137 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 155 M 	Perbaikan Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah

			<ul style="list-style-type: none"> • Lebar Jalan : 2 M 	baik
		Ruas Jalan 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 110 M • Lebar Jalan : 1,5 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 6	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 104 M • Lebar Jalan : 1,5 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
	5	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 210 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 221 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 45 M • Lebar Jalan : 1,5 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
	7	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 521 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 590 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 49 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
4	3	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 98 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 62 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik

		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 65 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 75 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
5	1	Ruas Jalan 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 157 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 103 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 155 M • Lebar Jalan : 2 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik
		Ruas Jalan 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Seminisasi • Panjang Jalan : 25 M • Lebar Jalan : 1,5 M 	Perbaiki Jalan Rusak Berupa Pelapisan Perkerasan Jalan dan pemeliharaan terhadap fisik jalan yang sudah baik

Sumber : Hasil analisis, 2021



5.2.3.2 Analisis Serta Rencana Arah Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Drainase Lingkungan

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur drainase lingkungan akan dilakukan pembangunan berupa drainase baik disisi kanan maupun disisi kiri jalan, karena masih ada ruas jalan pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti masih ada beberapa yang belum memiliki drainase lingkungan. Lebar dimensi drainase lingkungan yang direncanakan yaitu antara 0,4 hingga 1 meter. Berikut merupakan tabel rencana peningkatan kualitas infrastruktur drainase lingkungan pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti :



Tabel 5.16 Rencana Peningkatan Kualitas Infrastruktur Drainase Lingkungan

Jaringan Drainase Lingkungan		Ruas Jalan	Kondisi Eksisting Jaringan Drainase	Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan
RW	RT			
2	4	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 400 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 400 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
	Ruas Jalan 1	Tidak terdapat drainase pada kanan dan kiri ruas jalan	Pembangunan drainase pada kanan dan kiri ruas jalan	
	5	Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 566 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 734 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
3	4	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 556 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 492M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 274 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 4	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 310 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 5	Drainase rusak dan kotor pada kanan	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta

			dan kiri ruas jalan sepanjang 220 M	pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 6	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 208 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
	5	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 420 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 442 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 90 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
	7	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 1042 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 1180 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 98 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
4	3	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 196 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 124 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap

			dan kiri ruas jalan sepanjang 130 M	drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 4	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 150 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
5	1	Ruas Jalan 1	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 314 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 2	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 206 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 3	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 310 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani
		Ruas Jalan 4	Drainase rusak dan kotor pada kanan dan kiri ruas jalan sepanjang 50 M	Perbaiki drainase pada kanan dan kiri ruas jalan serta pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap drainase yang sudah ditangani

Sumber : Hasil analisis, 2021



5.2.3.3 Analisis Serta Rencana Arah Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Persampahan

Pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti, persampahan merupakan salah satu masalah utama. Pengelolaan sampah pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti masih dilakukan secara perorangan melalui dibakar ataupun dibuang pada area-area yang bukan sebagai tempat pembuangan sampah seperti sungai, parit, dan pekarangan/lahan kosong. Pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti juga belum terdapat infrastruktur persampahan baik berupa wadah komunal, komposter komunal, alat pengumpul sampah, maupun container untuk pembuangan sampah sementara. Berikut merupakan analisis terhadap kebutuhan infrastruktur persampahan pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti.

Tabel 5.17

Perkiraan volume sampah pada kawasan perencanaan

Kawasan Kumuh	jumlah penduduk (jiwa)	Perkiraan Volume Sampah (m ³ /hr/orang)		
		Domestik	Non Domestik	Jumlah
Kel Sri Meranti	4043	11,17	4,47	15,64

Sumber : Hasil analisis, 2021

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur persampahan pada kawasan perencanaan berupa pengadaan wadah komunal, komposter manual, alat pengumpul/gerobak, serta container amrol yang dipergunakan sebagai wadah komunal sebelum sampah dibuang ke TPS.

Konsep penanganan dilakukan dalam dua skala penanganan yaitu :

- Penanganan skala individu; yaitu pengolahan yang dilakukan oleh penghasil sampah secara langsung di sumbernya (rumah tangga/kantor). Contoh

pengolahan pada skala individu ini adalah pemilahan sampah atau komposting skala individu

- Penanganan skala kawasan yaitu pengolahan yang dilakukan untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah kota dan dikelola oleh pengelola kebersihan. Lokasi pengolahan dilakukan di instalasi pengolahan sampah terpadu (ipst) yang umumnya menggunakan bantuan peralatan mekanis

Tabel 5.18

Tabel kebutuhan infrastruktur persampahan

Kawasan Kumuh	jumlah penduduk	Sarana dan Prasarana Persampahan				
		wadah komunal	komposter komunal	alat pengumpul (gerobak)	container amrol/truk	TPS
Kel Sri Meranti	4043	40	81	6	1	2

Sumber : Hasil analisis, 2021

Selain infrastruktur persampahan di atas, perlu juga dipertimbangkan penyediaan infrastruktur persampahan TPST yang merupakan TPS yang terintegrasi dengan pengolahan sampah secara terpadu, seperti pengolahan kompos dalam skala besar.

5.2.3.4 Analisis Serta Rencana Arah Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Air Bersih dan Sanitasi

Pengelolaan air limbah termasuk program sanitasi lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah adanya pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah yang tidak terkendali. Sistem pembuangan air limbah di kawasan perencanaan saat ini masih bersifat individual dan belum memiliki sistem jaringan penyaluran

air limbah perpipaan maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Untuk pembuangan limbah rumah tangga belum terpisah dan masih terhubung langsung ke sistem drainase lingkungan sehingga dapat mencemari lingkungan.

Namun untuk MCK berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa mayoritas penduduk telah memiliki jamban dan *septic tank* sendiri untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. Namun, meski demikian tetap perlu adanya suatu upaya perencanaan kearah yang lebih baik mengingat peningkatan penduduk dimasa mendatang. Perencanaan sistem perlu dilakukan untuk mencegah pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Beberapa kriteria teknis yang digunakan untuk mengestimasi produksi limbah di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Produksi limbah rumah tangga (domestik), diprediksi sekitar 80% dari kebutuhan air bersih tiap jiwa perharinya. Sedangkan peningkatan volume serta jumlah limbah cairnya berkorelasi dengan penambahan jumlah penduduk
- Untuk penyediaan jamban jamak/komunal pada lokasi lokasi khusus yang dianggap perlu seperti fasilitas umum dengan ukuran $1,5 \times 3 \text{ m} = 4,5 \text{ m}^2$

Secara umum, pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti tidak terdapat permasalahan yang serius pada infrastruktur air bersih, masyarakat menggunakan sumur bor secara kolektif maupun perorangan untuk mendapatkan air bersih dan beberapa RT sudah tersedianya air bersih komunal. Usulan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi komunal pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti dapat diarahkan pada lokasi fasilitas umum. Sehingga perlu diperhatikan penyediaan

tangki air bersih kolektif yang juga terintegrasi dengan penyediaan WC umum kolektif pada lokasi tersebut.

5.2.3.5 Analisis Serta Rencana Arah Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Proteksi Kebakaran

Penyediaan infrastruktur proteksi kebakaran aktif dengan alat proteksi kebakaran yang lengkap terdiri atas sistem pendeteksi kebakaran baik manual maupun otomatis, penyediaan sistem pemadam kebakaran berbasis air dengan pembangunan hydrant, springkler, pipa tegak dan slang kebakaran. Lalu dengan menyediakan jalur evakuasi yang maksimal dan pembuatan akses jalan bagi mobil pemadam kebakaran.

Untuk infrastruktur proteksi kebakaran pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait sumber air pemadam kebakaran serta jaringan jalan lingkungan yang baik yang dapat dimasuki oleh kendaraan pemadam kebakaran. Untuk sumber air pemadam dapat dipersiapkan hidran pemadam pada masing-masing kawasan yang lokasinya memperhatikan tingkat kepadatan bangunan serta memperhatikan kemudahan akses mobil pemadam kebakaran untuk menjangkaunya.

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur proteksi kebakaran pada kawasan berupa pengadaan hidran pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti.

Berikut gambaran penempatan hidran :



Gambar 5.14 Penempatan arahan pembagunan Hidrant

5.2.3.6 Analisis Serta Rencana Arah Peningkatan Kualitas Infrastruktur

RTH

Penyediaan RTH dapat diarahkan perencanaannya pada lokasi ruang terbuka yang dekat dengan permukiman. Kondisi eksisting saat ini area tersebut merupakan ruang terbuka lapangan yang bisa difungsikan sebagai arena bermain anak maupun olahraga.

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur RTH pada kawasan berupa pembangunan RTH taman lingkungan yang berada di area tersebut. RTH dirancang terintegrasi antara fungsi lapangan olahraga, tempat bermain anak, dan taman penghijauan.



Gambar 5.15 Penempatan arahan pembangunan RTH

5.2.4 Rencana Prioritas

Rencana Prioritas arahan peningkatan kualitas infrastruktur pada permukiman kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti berdasarkan skala kepentingan dan kebutuhan terhadap indikator yang paling bermasalah dan yang perlu cepat ditangani. Berdasarkan kondisi tersebut maka prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sri Meranti dapat dilihat pada tabel 5.19 berikut ;

Tabel 5.19 Rencana Prioritas

Prioritas	peningkatan kualitas infrastruktur permukiman	Waktu pelaksanaan (tahun ke-)				
		1	2	3	4	5
Prioritas I	• Penanganan terhadap infrastruktur persampahan					
	• Penanganan terhadap infrastruktur proteksi kebakaran					
	• Penanganan terhadap infrastruktur drainase lingkungan					
Prioritas II	• Penanganan terhadap infrastruktur jalan lingkungan					
	• Penanganan terhadap infrastruktur Air bersih					
Prioritas III	• Penanganan terhadap infrastruktur sanitasi					
	• Penanganan terhadap infrastruktur RTH					

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti

Perhitungan tingkat kekumuhan akhir yang mana seluruh tingkat kekumuhan masing-masing RT di akumulasikan sehingga skor nilai tingkat kekumuhan akhir skala Kelurahan Sri Meranti adalah 22. Termasuk dalam tingkat kekumuhan ringan. Karena pada dasarnya sudah ada beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Sri Meranti sudah ada yang berjalan namun masih jauh dari harapan kita bersama. Karena program yang ditujukan untuk penanggulangan kawasan permukiman kumuh masih belum maksimal. Masing-masing indikator kekumuhan memiliki nilai poin yang berbeda-beda. Untuk kondisi bangunan memiliki nilai skor 0, untuk kondisi jaringan jalan lingkungan memiliki nilai skor 1, untuk kondisi drainase lingkungan memiliki nilai skor 3, untuk kondisi air minum memiliki nilai skor 1, untuk kondisi limbah memiliki nilai skor 0, untuk kondisi persampahan memiliki nilai skor 9 dan sistem proteksi kebakaran memiliki nilai skor 8. Maka didapat hasil akhir dari perhitungan tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti adalah 22 dan rata-rata kekumuhan sektoral adalah 28,55%.

2. Merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti

a. Rencana peningkatan kualitas infrastruktur jaringan jalan

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan tergantung dengan kondisi existing jaringan jalan. Pada jaringan jalan tanah maka dilakukan dengan peningkatan kualitas jalan dengan perkerasan/pengecoran (semenisasi). Dan pada jaringan jalan perkerasan rusak dapat dilakukan dengan perbaikan jalan berupa pelapisan perkerasan jalan. Pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti lebar maksimal penanganan jalan lingkungan adalah 2,5 meter dan lebar minimal 1,5 meter

b. Rencana peningkatan kualitas infrastruktur jaringan drainase

Rencana peningkatan kualitas infrastruktur drainase lingkungan akan dilakukan pembangunan berupa drainase baik disisi kanan maupun disisi kiri jalan, karena masih ada ruas jalan pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti masih ada beberapa yang belum memiliki drainase lingkungan. Lebar dimensi drainase lingkungan yang direncanakan yaitu antara 0,4 hingga 1 meter.

c. Rencana peningkatan kualitas infrastruktur persampahan

Pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti, persampahan merupakan salah satu masalah utama. Pengelolaan sampah pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti masih dilakukan secara perorangan melalui dibakar ataupun dibuang pada area-area yang bukan sebagai tempat pembuangan sampah seperti sungai, parit, dan pekarangan/lahan kosong. Pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti juga belum terdapat infrastruktur

persampahan baik berupa wadah komunal, komposter komunal, alat pengumpul sampah, maupun container untuk pembuangan sampah sementara. Maka penanganan yang tepat adalah dengan diadakannya penyediaan wadah komunal, alat pengumpul sampah dan TPS.

d. Rencana peningkatan kualitas infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi
Pengelolaan air limbah termasuk program sanitasi lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah adanya pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah yang tidak terkendali. Sistem pembuangan air limbah di kawasan perencanaan saat ini masih bersifat individual dan belum memiliki sistem jaringan penyaluran air limbah perpipaan maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Maka arahan penyediaan IPAL sangat dibutuhkan. Secara umum, pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti tidak terdapat permasalahan yang serius pada infrastruktur air bersih, masyarakat menggunakan sumur bor secara kolektif maupun perorangan untuk mendapatkan air bersih dan beberapa RT sudah tersedianya air bersih komunal.

e. Rencana peningkatan kualitas infrastruktur proteksi kebakaran

Untuk infrastruktur proteksi kebakaran pada kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti belum terdapat satupun fasilitas baik penyediaan hydran, apar dan tangki air pemadam. Maka arahan penyediaan infrastruktur proteksi kebakaran sangat dibutuhkan dengan penyediaan hydran sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan

f. Rencana peningkatan kualitas infrastruktur RTH

Penyediaan RTH dapat diarahkan perencanaannya pada lokasi ruang terbuka yang dekat dengan permukiman. Kondisi eksisting saat ini area tersebut merupakan ruang terbuka lapangan yang bisa difungsikan sebagai arena bermain anak maupun olahraga.

6.2 Saran

Dalam upaya arahan penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sri Meranti saat ini saran yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah di harapkan segera melakukan penganggaran pembiayaan penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti.
2. Masyarakat diharapkan adanya partisipasi dalam program yang pemerintah laksanakan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti.
3. Diperlukan suatu kajian atau penelitian lebih lanjut terkait penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti dengan arahan penataan permukiman berbasis *design visual*.

DAFTAR PUSTAKA

- A, D. C. (2002). *Ekistics An Introduction To The Sciense Of Human Sttlements*. London: Hutchinson Of London.
- Bainpoen. (1991). *Menata Kota dan Permukiman Kumuh*. Jakarta: Gramedia.
- Budiharjo. (1997). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Daryanto. (2014). *Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dunn, w. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fernandes. (1984). *Testing and Measurement*. Jakarta: Evaluation and Curriculum Development.
- Herlianto. (1986). *Urbanisasi Dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Johan, S. (1990). *Pengembangan Permukiman Bertumpu Pada Masyarakat*. Bandung: Gunadarma.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direkorat Pengembangan Kawasan Permukiman . (n.d.). Bersama Program KOTAKU " Kita Tuntaskan Kumuh". Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direkorat Pengembangan Kawasan Permukiman .
- Komarudin. (1997). *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia, PT. Rakasindo.
- Korten. (1984). *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Studi Pembangunan.

- Mardikanto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Nawawi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh No. 02/PRT/M/ Tahun 2016.
- Ramadhan, R. &. (2014). *Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Perkotaan*. Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak: Cendekia.
- Rindarjono. (2013). *Slum kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Saryono. (2010). *Mtode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta.
- Stufflebeam. (1971). *Educational Evaluation and Decision Making*. UK: Peacock Publishers.
- Suparlan, P. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sumaatmadja. (1988). *Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang No.1, 2011. Perumahan dan Permukiman. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Tentang Perumahan dan Permukiman
- Yudohosodo. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 903/KPTS/FT-UIR/2021
TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Membaca : Surat Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Nomor : 340/TA/PWK/FT/2021 tentang persetujuan dan usulan pengangkatan Tim Pembimbing penelitian dan penyusunan Skripsi.

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan perkuliahan bagi mahasiswa Fakultas Teknik perlu membuat Skripsi.
2. Untuk itu perlu ditunjuk Tim Pembimbing penelitian dan penyusunan Skripsi yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tim Pembimbing Penelitian & penyusunan Skripsi Mahasiswa Fak. Teknik Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Febby Asteriani, S.T.,M.T	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang akan dibimbing :

Nama : Hanafi Hidayat
NPM : 143410637
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1442 H
02 Agustus 2021 M

Dekan,



Dr. Eng. Muslim, ST., MT

NPK : 09 11 02 374

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru.
2. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UIR
3. Arsip

**Surat ini ditandatangani secara elektronik*

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi S.1 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Univ. Islam Riau dilaksanakan Ujian Skripsi/Komprehensif sebagai tugas akhir. Untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan dosen penguji yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Hanafi Hidayat
NPM : 143410637
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru

2. Penguji Skripsi/Komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari :
1. Febby Asteriani, S.T., M.T. Sebagai Ketua Merangkap Penguji
2. Faizan Dalilla, S.T., M.Si. Sebagai Anggota Merangkap Penguji
3. Muhammad Sofwan, S.T., M.T. Sebagai Anggota Merangkap Penguji

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah sampai kepada Pimpinan Fakultas selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Muharram 1443 H
10 Agustus 2021 M

Dekan,



Dr. Eng. M MT
NPK : 09 11 02 374

Disampaikan :

Rektor UIR di Pekanbaru.



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Jalan Kaharuddin Nasution No.113 Marpoyan - Pekanbaru 28284
Telp 0761-674635, 674674.

SURAT KETERANGAN

PERSETUJUAN JILID TUGAS AKHIR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, pembimbing tugas akhir menerangkan bahwa mahasiswa dengan:

Nama : Hanafi Hidayat
NPM : 143410637
Fakultaas : Teknik
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul Tugas Akhir : Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru

Telah memperbaiki dan menyempurnakan tugas akhir sesuai dengan berita acara komprehensif tugas akhir, dan selanjutnya disetujui untuk di jilid.

Demikianlah surat keterangan persetujuan jilid Tugas Akhir ini di buat untuk dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 November 2021

Pembimbing

Febby Asteriani, ST.,MT

Penguji I

Faizan Dalilla, ST, M.Si

Penguji II

Muhammad Sofyan, ST, MT



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS
AKHIR SEMESTER GENAP TA
2020/2021

NPM : 143410637
 Nama Mahasiswa : HANAFI HIDAYAT
 Dosen Pembimbing : 1. FEBBY ASTERIANI ST, MT
 Program Studi : TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 Judul Tugas Akhir : STUDI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SRI MERANTI KOTA PEKANBARU
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IN THE SRI MERANTI VILLAGE, PEKANBARU CITY
 :STUDY OF THE MANAGEMENT OF SLUM AREAS
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin 09 November 2020	Bab I	<ol style="list-style-type: none"> Perhatikan jumlah kalimat dalam 1 paragraf tidak boleh terlalu banyak hampir 1 halaman Perhatikan hubungan antar paragraf , jangan lepas Lengkapi latar belakang masalah dengan permasalahan wilayah studi Konsistensi penggunaan halaman/ tidak sumber literatur Batas U,S,B,T tidak diletak pada latar belakang dirunag lingkup saja Perbaiki kerangka berfikir 	fe
		Objek Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Cek lagi apakah pertumbuhan penduduk bisa melihat perubahan Keeluran setiap tahunnya Ditambahkan data yang memperkuat 	fe
2.	Rabu 10 Maret 2021	BAB II	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Lingkup penelitian diperjelas.apakah 1 kelurahn termasuk permukiman kumuh Sumber literatur di usahakan sedapat mungkin sumber utama Lengkapi referensi dengan jurnal dan buku-buku yang terkait terlebih dahulu 	fe
3.	Selasa 16 Maret 2021	Revisi OK	ACC Seminar Proposal	fe

Buku ini adalah Arsip Mhik :

4.	Sabtu 27 Maret 2021	Revisi Bab V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan di sesuaikan dengan urutan sasaran. Bahas tingkat kekumuhan ,lalu arahan berdasarkan wawancara dan priorotas berdasarkan hasil hitunga faktor 2. Deskripsikan dengan jelas bagaimana kondisi lapangan di setiap indikator kekumuhan 3. Lengkapi dengan dokumentasi tentang kondisi lapangan 4. Buat tabel rekapitulasi kekumuhan di setiap RT/RW 5. Analisi tingkat kekumuhan diawali saja dengan identifikasi kondisi eksisting 6. sesuaikan judul pembahasan sasaran ke dua dengan bahasa sasaran ke dua pada bab 1 	fe
		Revisi BAB VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buat Kesimpulan Sesuai dengan urutan sasaran 2. Lengkapi bab 6 dengan sub bab sasaran 	fe
		Abstrak	Buat Abstrak 3 paragraf 150-250 kata, yang berisi latar belakang permasalahan wilayah dan tujuan penelitian, metode dan teknik sampling, hasil penelitian	fe
5.	Selasa/ 27 April 2021	Revisi OK	ACC Seminar Hasil	fe
6.	Selasa / 03 Juli 2021	Revisi setelah seminar hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki penulian sub bab V 2. Pemuktahiran hasil penelitian 	fe
7.	Sabtu/ 17 Juli 2021	Revisi OK	ACC untuk ujian komprehensif	fe

Pekanbaru,.....

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTYZNDEWMDMO



Dr. Mursyidah, M. Sc.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS TEKNIK

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Email: fakultas_teknik@uir.ac.id Website: www.eng.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 277/A-UIR/5-T/2021

Operator Turnitin Fakultas Teknik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa Mahasiswa/i dengan identitas berikut:

Nama : **HANAFI HIDAYAT**
NPM : 143410637
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi TA : **STUDI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SRI MERANTI KOTA PEKANBARU**

Dinyatakan **Bebas Plagiat**, berdasarkan hasil pengecekan pada Turnitin menunjukkan angka **Similarity Index < 30%** sesuai dengan peraturan Universitas Islam Riau yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kaprodik. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Puji Astuti, S.T., M.T.

Pekanbaru, _ 5 Agustus 2021 M

26 Dzul Hijjah 1442 H

Operator Turnitin F. Teknik

Zulfadhli, S.T.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 13650/LDIK-UIR/2021

Berdasarkan
Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 002/UIR/PR/2021
dan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 525/UIR/KPTS/2018

Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa :

HANAFI HIDAYAT

Nomor Pokok Mahasiswa: 143410637

Lahir di Perawang Tanggal Tiga Belas Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima
Mahasiswa Prodi Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Amat Baik**

Pekanbaru, 28 Juli 2021



Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
NIP: 120902447

Diuji Pada : 28.07.21

LAMPIRAN



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 870 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 151
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :**
- bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru, yang semula 58 Kelurahan menjadi 83 Kelurahan;
 - bahwa adanya perubahan nama Kelurahan, batas administrasi Kelurahan, batas administrasi Rukun Warga maupun batas Rukun Tetangga, nama lokasi baseline 100 0 100, sehingga mempengaruhi terhadap administrasi lokasi kumuh di Kota Pekanbaru;
 - bahwa dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016, lokasi delineasi kumuh di Kelurahan Meranti Pandak sebagian masuk kepada Kawasan Strategis, sehingga apabila melakukan pembangunan melalui kegiatan penanganan kumuh di lokasi ini untuk jangka panjang akan bertentangan dengan RTRW;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh;
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016;
 3. Pedoman Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Menambah Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, semula 7 (tujuh) Kawasan Permukiman Kumuh menjadi 8 (delapan) Kawasan Permukiman Kumuh, 6 (enam) Kecamatan dari 12 Kecamatan, meliputi 19 (sembilan belas) Kelurahan, dengan luas total permukiman kumuh 113, 56 Ha (seratus tiga belas koma lima puluh enam) Hektar.

- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, ditetapkan berdasarkan hasil pendataan review baseline 100 0 100 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan partisipasi masyarakat, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016;
- KEEMPAT : Mengurangi luasan kumuh di Kelurahan Meranti Pandak, karena lokasi delineasi di Kelurahan Meranti Pandak merupakan Kawasan Strategis yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA PEKANBARU,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 870/TA/UR/2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN LOKASI
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU

NAMA KAWASAN	LINGKUP ADMINISTRASI		LUAS (Ha)	Luas Kumuh Per Kelurahan	KOORDINAT		LEGALITAS LAHAN
	KELURAHAN	KECAMATAN			LATITUDE (X)	LONGITUDE (Y)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Kawasan Kumuh Sungai Sago	Kampung Dalam	Senapelan	24,10	5,00	101° 26' 45,341" E	0° 32' 15,384" N	Tanah Masyarakat
	Sago	Senapelan		1,86	101° 26' 44,043" E	0° 31' 59,427" N	Tanah Masyarakat
	Kota Baru	Pekanbaru Kota		4,30	101° 26' 41,525" E	0° 31' 28,610" N	Tanah Masyarakat
	Sukaramai	Pekanbaru Kota		6,60	101° 26' 41,525" E	0° 31' 28,610" N	Tanah Masyarakat
	Tanah datar	Pekanbaru Kota		6,30	101° 26' 41,525" E	0° 31' 28,610" N	Tanah Masyarakat
Kawasan Kumuh Kota Lama	Kampung Bandar	Senapelan	15,46	9,50	101° 26' 29,286" E	0° 32' 23,996" N	Tanah Masyarakat
	Kampung Baru	Senapelan		2,70	101° 25' 58,428" E	0° 32' 29,618" N	Tanah Masyarakat
	Tirta Siak	Payung Sekaki		3,30	101° 25' 38,698" E	0° 32' 32,441" N	Tanah Masyarakat
Kawasan Pesisir Kumuh	Pesisir	Limapuluh	23,00	6,40	101° 27' 1,296" E	0° 32' 23,144" N	Tanah Masyarakat
	Rintis	Limapuluh		9,50	101° 27' 2,471" E	0° 32' 3,989" N	Tanah Masyarakat
	Tanjung Rhu	Lima Puluh		7,10	101° 27' 43,404" E	0° 32' 41,881" N	Tanah Masyarakat
Kawasan Kumuh Meranti	Meranti Pandak	Rumbai Pesisir	15,00	4,60	101° 26' 47,223" E	0° 32' 30,889" N	Tanah Masyarakat
	Sri Meranti	Rumbai		10,40	101° 25' 55,938" E	0° 32' 46,745" N	Tanah Masyarakat

NAMA KAWASAN	LINGKUP ADMINISTRASI		LUAS (Ha)	Luas Kumuh Per Kelurahan	KOORDINAT		LEGALITAS LAHAN
	KELURAHAN	KECAMATAN			LATITUDE (X)	LONGITUDE (Y)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Rumbai Pesisir	14,60	3,90	101° 27' 0,437" E	0° 34' 6,969" N	Tanah Masyarakat
	Limbungan	Rumbai Pesisir		8,30	101° 27' 2,526" E	0° 33' 46,919" N	Tanah Masyarakat
	Limbungan Baru	Rumbai Pesisir		2,40	101° 26' 50,129" E	0° 34' 8,025" N	Tanah Masyarakat
Kawasan Kumuh Lembah Damai	Lembah Damai	Rumbai Pesisir	13,00	13,00	101° 26' 46,718" E	0° 34' 36,415" N	Tanah Masyarakat
Kawasan Kumuh Padang Terubuk	Padang Terubuk	Padang Terubuk	5,30	5,30	101° 26' 16,888" E	0° 32' 2,347" N	Tanah Masyarakat
Kawasan Kumuh Sumahilang	Sumahilang	Pekanbaru Kota	3,10	3,10	101° 26' 55,346" E	0° 31' 34,332" N	Tanah Masyarakat
8	19	6	113,56	113,56			

WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRDAUS

FORMAT B. DAFTAR PERTANYAAN PENDATAAN 100-0-100 BERBASIS WILAYAH

B. INFORMASI UMUM

Provinsi	: RIAU	Kelurahan/Desa	:
Kab/Kota	: PEKANBARU	RT/RW/Dusun	:
Kecamatan	: RUMBAI	Tanggal Pendataan	:

B.1 KEPADATAN BANGUNAN HUNIAN

- | | | | |
|---|--|---|----------|
| 1 | Berapa luas wilayah RT/RW/dusun*? | : | Ha |
| 2 | Berapa luas wilayah permukiman? | : | Ha |
| 3 | Berapa jumlah total bangunan di wilayah RT/RW/dusun*? | : | Ha |
| 4 | Berapa persentase luas kawasan permukiman yang terletak di wilayah dengan kemiringan lebih dari 15%? | : |% |

B.2 JALAN LINGKUNGAN

- | | | | |
|---|--|---|-------------|
| 5 | Berapa panjang total jaringan jalan lingkungan yang telah ada/eksisting? | : | Meter |
| 6 | Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar \geq 1,5 meter? | : | Meter |



- 7 Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar \geq 1.5 meter yang permukaannya diperkeras? : Meter
- 8 Berapa Panjang Kebutuhan Jalan baru diluar eksisting sehingga melayani permukiman seluruhnya? (Jawaban sesuai hasil perencanaan, bila ada) : Meter
- 9 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar \geq 1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak? : Meter
- 10 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar \geq 1,5 meter yang permukaannya tanah dan tidak rusak? : Meter
- 11 Berapa panjang jalan lingkungan dgn lebar $<$ 1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak? : Meter
- 12 Panjang jalan lingkungan dgn lebar $<$ 1,5 meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak? : Meter
- 13 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar \geq 1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan? : Meter
- 14 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar $<$ 1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan? : Meter

B.
3 DRAINASE LINGKUNGAN



- 
- 15 Berapa tinggi genangan rata-rata (jika jawaban a, maka langsung ke no. 15)?
- a Tidak pernah terjadi genangan
- b Tinggi genangan ≤ 30 cm
- c Tinggi genangan >30 cm
- 16 Berapa durasi genangan air/ banjir rata-rata?
- a Lama genangan ≤ 2 jam
- b Lama genangan >2 jam
- 17 Berapa frekuensi genangan air/ banjir?
- a Terjadi ≤ 2 kali/tahun
- b Terjadi >2 kali/tahun
- 18 Berapa luas area genangan air/ banjir dalam permukiman? :
Ha
- 19 Apa sumber genangan air/ banjir?
- a Rob/Pasang air laut
- b Air sungai/danau/rawa
- c Limpasan air hujan/ air buangan rumah tangga
- 20 Berapa panjang total drainase yang telah ada (eksisting) dipermukiman? :Meter
- 21 Periksa Daftar Usulan/Siteplan Peningkatan Kualitas Drainase sd 2020. Apakah ada usulan drainase baru untuk melayani permukiman?
- a Ya
- b Tidak

22 Jika Ya, Berapa panjang kebutuhan drainase baru tersebut sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya. (Jawaban sesuai hasil perencanaan) : Meter

23 Periksa Daftar Usulan/Siteplan Peningkatan Kualitas Drainase sd 2020. Apakah ada Usulan Drainase penghubung dari drainase yang ada (eksisting) dengan sistem drainase kota. a Ya b Tidak

24 Jika Ya, Berapa Panjang penghubung drainase eksisting dengan sistem drainase kota. (Jawaban sesuai hasil perencanaan) : Meter

25 Apakah drainase eksisting bersih dan tidak bau (terpeliharaan)? a Ya b Tidak

26 Jika ya, berapa panjang drainase eksisting yang bersih dan tidak bau (terpeliharaan)? : Meter

27 Berapa panjang drainase eksisting dipermukiman dengan kondisi konstruksi tidak rusak/baik? : Meter

B. 4 SANITASI LINGKUNGAN

28 Apakah buangan limbah cair rumah tangga terpisah dengan saluran a Ya b Tidak



drainase?

B. 5 PENGELOLAAN SAMPAH

29 Apakah ada prasarana pengelolaan sampah yang melayani permukiman (TPS/TPS-3R/TPST)?

a	<input type="checkbox"/>	Ya	b	<input type="checkbox"/>	Tidak
---	--------------------------	----	---	--------------------------	-------

30 Apakah ada sarana pengangkutan sampah yang melayani permukiman (Gerobak/Motor/Mobil)?

a	<input type="checkbox"/>	Ya	b	<input type="checkbox"/>	Tidak
---	--------------------------	----	---	--------------------------	-------

31 Apakah konstruksi prasarana persampahan (No.29) dan sarana (No.30), semua kondisinya baik/tidak rusak?

a	<input type="checkbox"/>	Ya, (No 29 & 30 keduanya baik)	b	<input type="checkbox"/>	Tidak (keduanya atau salah satunya rusak)
---	--------------------------	--------------------------------	---	--------------------------	---

B. 6 PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN



- 32 Berapa frekuensi kejadian kebakaran di lingkungan permukiman?
- a Tidak pernah terjadi kebakaran dalam 5 tahun
- b 1-2 kali dalam 5 tahun
- c > 2 kali dalam 5 tahun
- 33 Apa penyebab kejadian bencana kebakaran?
- a Tungku/kompor masak
- b Konsleting listrik
- c Kebakaran hutan/ilalang
- d Pembakaran sampah
- e Lainnya
- 34 Apakah ada sarana pencegahan bahaya kebakaran?
- a Pos/Stasiun pemadam kebakaran
- b Hidran air/Tangki Air/sumber air lain yang terbuka
- c Mobil/motor pemadam kebakaran/APAR
- d Tidak ada
- 35 Apakah tersedia jalan dengan lebar minimal 3,5 meter di lingkungan permukiman dengan radius rumah terjauh kurang dari 100 m?
- a Ada
- b Tidak

B. 7 DATA NON FISIK (jawaban bisa lebih dari 1)

- 36 Apakah tersedia fasilitas kesehatan di dalam lingkungan RT?
- a Rumah Sakit b Prakter Dokter/ Poliklinik c Puskesmas/ Pustu
- d Dukun/ pengobatan tradisional e Bidan/ mantri f Tidak ada
- 37 Apakah tersedia fasilitas pendidikan di dalam lingkungan RT?
- a TK/ PAUD b SD/ sederajat c SMP/ sederajat
- d SMA/ SMK/ sederajat e Perguruan tinggi f Tidak ada

B. PERTIMBANGAN LAIN (Pilih salah satu)

8

- 38 Apakah lokasi berada pada fungsi strategis Kab/Kota?
- a Ya b Tidak
- 39 Apakah Lokasi memiliki Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan?
- a Ya b Tidak

Ket: * pilih yang sesuai



FORMAT A. DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN 100-0-100

A. INFORMASI UMUM

Provinsi	: RIAU	Nama Kepala Rumah Tangga	:	
Kab/Kota	: PEKANBARU	Jumlah Kepala Keluarga	:	
Kelurahan/Desa		Status Rumah Tangga	:	MBR/ Non MBR
Tanggal	Jumlah Anggota Rumah Tangga	:jiwa
Pendataan				Laki-laki: jiwa Perempuan: jiwa
				Difabel: jiwa

A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN

1. Apakah bangunan hunian memiliki **AKSES LANGSUNG** ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain?

a	<input type="checkbox"/>	Ya		b	<input type="checkbox"/>	Tidak
---	--------------------------	----	--	---	--------------------------	-------

2. Apakah **POSISI MUKA** bangunan hunian menghadap jalan?

a	<input type="checkbox"/>	Ya		b	<input type="checkbox"/>	Tidak
---	--------------------------	----	--	---	--------------------------	-------

3. Apakah posisi bangunan hunian langsung menghadap sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau?

a	<input type="checkbox"/>	Tidak ada sungai/laut/rawa/danau		b	<input type="checkbox"/>	Ya		c	<input type="checkbox"/>	Tidak
---	--------------------------	----------------------------------	--	---	--------------------------	----	--	---	--------------------------	-------



- 4 Apakah bangunan hunian berada di atas lahan sempadan sungai/laut/rawa/danau? a Tidak ada sungai/laut/rawa/danau b Tidak c Ya
- 5 Apakah bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik atau di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)? a Tidak b Ya

A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN

- 6 Berapa luas lantai bangunan hunian? : (a) Panjang:m (b.) Lebar: m (c.) Jumlah Lantai: ...
- 7 Berapa jumlah penghuni bangunan hunian? : jiwa
- 8 Berapa luas lantai bangunan hunian/ jiwa? a $\geq 7,2$ meter²/ jiwa b $< 7,2$ meter²/ jiwa
- 9 Bagaimana kondisi atap terluas? a Tidak Bocor b Bocor
- 10 Bagaimana kondisi dinding terluas? a Baik b Rusak
- 11 Apakah jenis lantai terluas? a Bukan Tanah b Tanah

A.3 AKSES AIR MINUM

- 12 Darimana sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI didapat? - a Ledeng Meteran/SR b Ledeng Tanpa Meteran c Sumur Bor/Pompa



pilih salah satu dari pilihan jawaban.
(jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13)

d Sumur Terlindung

e Mata Air Terlindung

f Air Hujan

g Air Kemasan/ air isi ulang

h Sumur tak terlindungi

i Mata Air tak Terlindung

j Sungai/Danau/Kolam

k tangki/mobil/ gerobak air

13 Bila jawaban No. 12 di atas sumur bor, sumur terlindung atau mata air terlindung, maka berapa jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)?

a ≥ 10 m

b < 10 m

14 Apakah kebutuhan air minum, mandi, cuci terpenuhi sepanjang tahun?

a Tercukupi/terpenuhi sepanjang tahun

b Tercukupi hanya pada bulan tertentu

c Tidak pernah tercukupi

A.4 PENGELOLAAN SANITASI

15 Dimana biasanya anggota rumah tangga Buang Air Besar?
(jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18)

a Jamban sendiri/ bersama (maks 5 KK untuk 1 jamban bersama)

b Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)

c Tidak di jamban

16 Apakah jenis kloset yang digunakan?

a Leher angsa

b Bukan leher angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)



17 Dimana limbah tinja dibuang?

a Septictank pribadi/komunal/IPAL

b Bukan septictank/IPAL

A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

18 Dimana tempat pembuangan sampah rumah tangga? (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20)

a Tempat sampah pribadi

b Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R

c Dalam Lubang/dibakar

d ruang terbuka/ lahan kosong/ jalan

e Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut/ Drainase (Got/Selokan)

19 Berapa kali pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPA?

a $\geq 2x$ seminggu

b $\leq 1x$ seminggu

A.6 DATA NON-FISIK

A.6.1 PENDAPATAN RUMAH TANGGA

20 Apa mata pencaharian utama rumah tangga?

a pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan

b Perikanan/ nelayan

c Pertambangan/ galian

d Industri/ pabrik

e Konstruksi/ bangunan

f Perdagangan/ jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)

g Pegawai pemerintah



21 Berapa daya Listrik yang digunakan dalam bangunan hunian (Watt)?

a ≤ 450

d ≥ 2200

b 900

c 1300

e menumpang ke tetangga/ tidak punya meteran sendiri/ dll

A.6.2 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL

22 Apa jenis fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan rumah tangga?

a Rumah Sakit

b Prakter Dokter/ Poliklinik

c Puskesmas/ Pustu

d Dukun/ pengobatan tradisional

e Bidan/mantri

f Tidak Pernah

23 Di mana lokasi/ letak fasilitas kesehatan yang sering digunakan rumah tangga?

a Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama

b Di luar kecamatan

c Di kota lain

24 Jika ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (9 tahun), di mana lokasi SD/ sederajat dan SMP / sederajat terdekat yang digunakan?

a Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama

b di luar kecamatan

c di kota lain

d Tidak sekolah

e tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar

A.6.3 ASPEK PENGUASAAN BANGUNAN DAN LAHAN

25 Apakah status bangunan hunian?

a Milik sendiri

b Sewa/Kontrak

c Numpang/milik pihak lain

26 Apakah status legalitas bangunan hunian?

a Memiliki IMB

b Tidak/belum memiliki IMB

27 Apakah status lahan bangunan hunian?

a Milik sendiri

b Sewa/Kontrak

c Numpang/milik pihak lain

28 Apakah status legalitas lahan bangunan hunian?

a SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah

b Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat)

c Milik pihak lain tanpa surat perjanjian

d Tidak ada / tidak tahu

